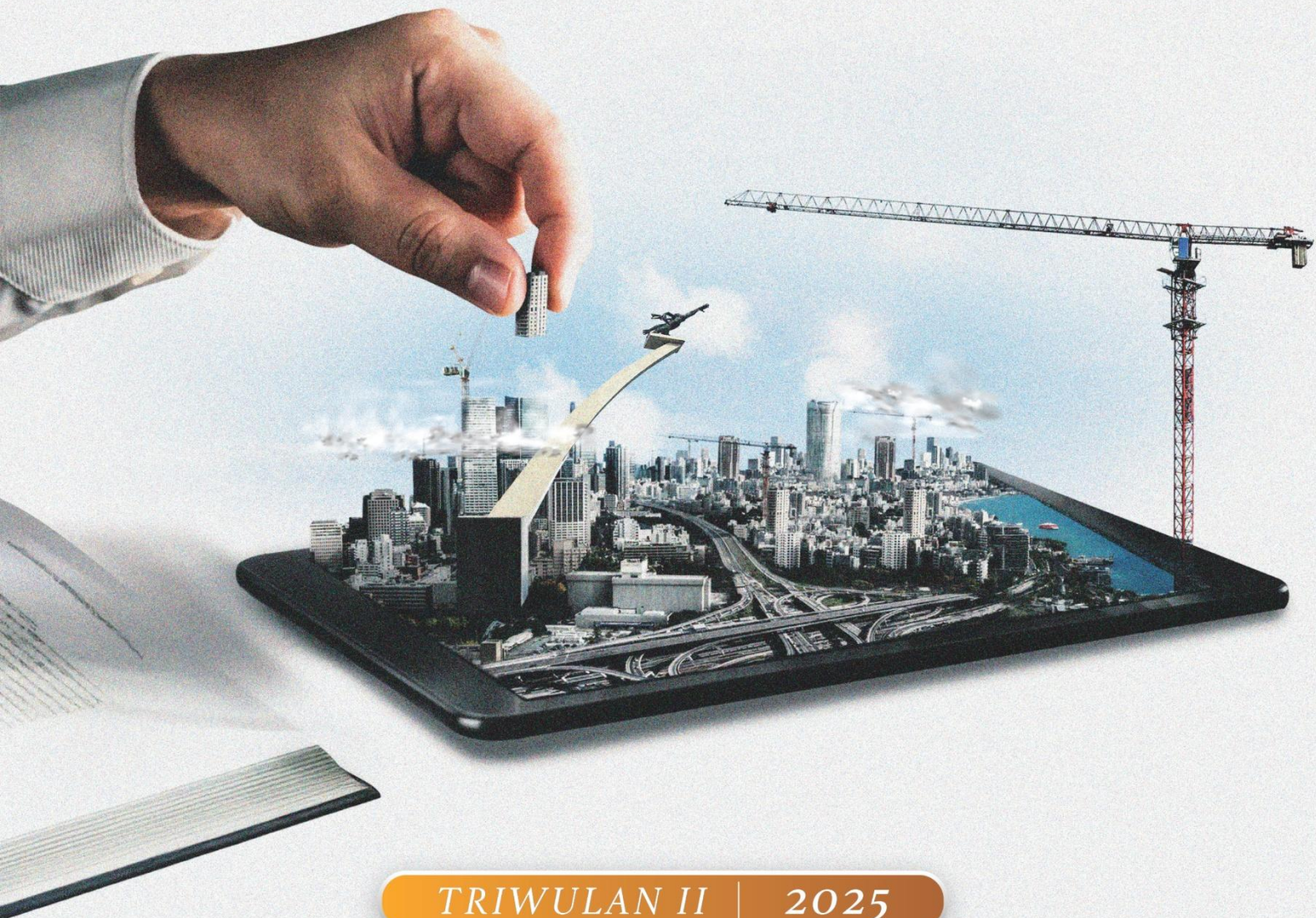




LMCK

(LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA)



TRIWULAN II | 2025

**BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III KALIMANTAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI**



**Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III
Kalimantan Utara Tahun 2025**

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III
Kalimantan Utara
Tahun 2025**

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	1. M. Rifa Badiurrohman, S.Tr.Tra	Pengawas Transportasi Darat	11/07/2025	
		2. Valka Ramdani Himawan, S.Tr.T	Penelaah Teknis Kebijakan	11/07/2025	
		3. Abdul Haris Syariful Quro`, S.Tr.Tra.	Penelaah Teknis Kebijakan	11/07/2025	
2.	Diperiksa	Iwan Sarwoko, S.SiT., M.T.	Kepala Balai	11/07/2025	



• KATA

PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara mengemban amanah menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat. Sebagai institusi publik, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel.

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran.

Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun isi dari laporan ini mencakup Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Pengukuran Kinerja Triwulan II tahun 2025 serta tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja Triwulan II tahun 2025.

Kami berharap Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintah pada tahun-tahun mendatang.

Tanjung Selor, 11 Juli 2025

Kepala BPTD Kelas III Kalimantan Utara



IWAN SARWOKO, S.SiT., M.T

NIP. 197604101998031006



• RINGKASAN EKSEKUTIF

RINGKASAN EKSEKUTIF

Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming melanjutkan Kepemimpinannya melalui Kabinet Merah Putih periode Tahun 2025 - 2029 mengusung Visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas”.

Visi tersebut akan diwujudkan dalam 8 Asta Cita sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Visi tersebut diterjemahkan lebih lanjut ke dalam RPJMN periode 2025-2029. Pencapaian visi Kabinet Kerja tersebut dapat terwujud apabila segenap jajaran pemerintahan menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan optimal, yang direfleksikan dari pencapaian kinerja dalam mendukung agenda prioritas nasional.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara Tahun 2025-2029, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara telah menetapkan Visi yang merupakan pengejawantahan dari visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 dalam rangka mendukung terwujudnya

visi Presiden Republik Indonesia 2025-2029, yaitu: Transportasi Maju menuju Indonesia Emas 2045”.

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara berada di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara serta Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kebijakan dan Program. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya organisasi pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

Dari tujuan di atas, dapat dijabarkan secara konkret ke dalam Sasaran Kegiatan. Setiap sasaran tersebut disertai dengan ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran dimaksud. Pada tahun 2025, ditetapkan 4 (empat) Sasaran Kegiatan (SK) dan 9 (Sembilan) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), beserta targetnya. Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan evaluasi kinerja Triwulan IV tahun 2025, secara keseluruhan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara sudah cukup baik. Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada Triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Persentase layanan angkutan jalan perintis terealisasi sebesar 26,08% (Target 90%);
2. Persentase Jumlah Simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda sebesar 34,43% (Target 1 Lokasi);
3. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan terealisasi sebesar 16,33% (Target 90%);
4. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi terealisasi sebesar 38,71% (Target 11 lokasi);
5. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terealisasi sebesar 57,76% (Target 90%);
6. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan terealisasi sebesar 0% (Target 100 orang);
7. Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar 0% (Target 80%);

8. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terealisasi sebesar 6,13% (Target 100);
9. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebesar 46,25% (Target 100).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	14
I.1 Latar Belakang	14
I.2 Tugas Pokok dan Fungsi	14
I.2.1 Bagan Struktur Organisasi	15
I.3 Sumber Daya Manusia	16
I.4 Potensi, Isu Strategis Dan Permasalahan	16
I.5 Sistematika Laporan	18
I.6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis	20
I.6.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025	22
I.7 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025	24
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA	28
II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja	28
II.2 Pengukuran Capaian Kinerja	28
Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	32
Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	48
Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	58
Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	61
II.3 Realisasi Anggaran	65
II.3.1 Alokasi Anggaran Tahun 2025	65
II.3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025	70
BAB III PENUTUP	75
III.1 PENUTUP	75
III.2 HASIL EVALUASI, REKOMENDASI DAN UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	76
LAMPIRAN	79

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Pencapaian Sasaran Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara Tahun 2025 – 2029 (Tabel Realisasi 2020-2022 merupakan data BPTD Wilayah XVII Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dan Target 2023 merupakan target untuk BPTD Kelas III Kalimantan Utara).....	20
Tabel I. 2 Rencana Kerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara Tahun 2025.....	22
Tabel I. 3 Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara Tahun 2024.....	24
Tabel II. 1 Pengukuran Kinerja Balai Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara Tahun 2025	31
Tabel II. 2 Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025	34
Tabel II. 3 Progres Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Provinsi Kalimantan Utara Triwulan II Tahun 2025	36
Tabel II. 5 Lintasan Angkutan Perintis Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024	41
Tabel II. 6 Progres Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Tahun 2025	42
Tabel II. 7 Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan di Kalimantan Utara	45
Tabel II. 8 Realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	63
Tabel II. 9 Rincian per Sumber Dana Pagu Tahun 2025.....	66
Tabel II. 10 Rincian per Jenis Belanja Pagu Tahun 2025.....	66
Tabel II. 11 Rincian Revisi per Sumber Dana Tahun 2025	66
Tabel II. 12 Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2025.....	67
Tabel II. 13 Rincian Realokasi Per Sasaran Kegiatan dan Kegiatan Tahun 2025.....	68
Tabel II. 14 Rincian Realokasi Per Sasaran Kegiatan dan Kegiatan Tahun 2025	68
Tabel II. 15 Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2023-2025.....	69
Tabel II. 16 Kegiatan Program yang ada dalam DIPA.....	70
Tabel II. 17 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025.....	70
Tabel II. 18 Realisasi Anggaran per Jenis Sumber Dana Triwulan II TA 2025	71
Tabel II. 19 sisa Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2025 Berjalan	72
Tabel II. 20 sisa Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025 Berjalan	72
Tabel II. 21 Efisiensi Anggaran	72
Tabel II. 22 Perbandingan Jumlah Kebutuhan dan Jumlah eksisting SDM.....	73
Tabel III. 1 Evaluasi, rekomendasi dan unit kerja penanggung jawab	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Bagan struktur organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara	15
Gambar II. 1 Grafik Capaian IKK Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2024	33
Gambar II. 2 Grafik Capaian IKK Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	38
Gambar II. 3 Grafik Capaian IKK Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	41
Gambar II. 4 Grafik Capaian IKK Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi.	45
Gambar II. 5 Grafik Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal	49
Gambar II. 6 Grafik Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan.....	52
Gambar II. 7 Grafik Presentase standarisasi pengujian kendaraan bermotor.	55
Gambar II. 8 Grafik Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat.	59
Gambar II. 9 Grafik Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat.	62
Gambar II. 10 Grafik Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2023-2024	69
Gambar II. 11 Grafik Penyerapan Pagu Anggaran Triwulan IV Tahun 2024	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025	79
Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	80
Lampiran 3 Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025	82
Lampiran 5 Rencana Aksi Revisi I atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024	85
Lampiran 6 Rencana Aksi Revisi II atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024	86
Lampiran 7 Monev Renaksi	87



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Balai Pengelola Transportasi Darat dituntut menjadi unit pelaksana yang melakukan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik daratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersial dan perintis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta menyelenggarakan manajemen perencanaan, program, anggaran, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan di satuan pelayanan masing – masing hingga evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perhubungan Darat No. 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Sebagai salah satu Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara dituntut untuk menyelenggarakan Sistem Pemerintahan dengan Prudent, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien sesuai dengan prinsip – prinsip Good Governance sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga itu diperlukan Akuntabilitas Publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraanya.

I.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara merupakan salah satu UPT dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mendukung tugas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Darat No. 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengawasan terhadap Pelabuhan Penyeberangan, pengendalian dan pengawasan keselamatan sarana, prasarana, lalu lintas dan angkutan jalan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan penyeberangan. Adapun dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Balai Pengelola

Transportasi Darat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran;

2. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri;
3. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan jalan antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan;
4. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengendalian lalu lintas jalan, Sungai, danau, dan penyeberangan;
5. Pelaksanaan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan;
6. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya manusia, keuangan, hukum, dan hubungan Masyarakat;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

I.2.1 Bagan Struktur Organisasi

Bagan struktur organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :



Gambar I. 1 Bagan struktur organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara

I.3 Sumber Daya Manusia

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara memiliki Sumber Daya Manusia dengan jumlah total Pegawai 95 orang, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 61 orang dan Pegawai Non ASN sebanyak 34 orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Kantor induk Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara sebanyak 43 orang ASN dan 18 orang Pegawai Non ASN.
2. Wilayah Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara:
 - a. Wilayah Kerja Tanjung Selor 1 orang ASN dan 3 orang Pegawai Non ASN
 - b. Wilayah Kerja Tarakan 3 orang ASN dan 6 orang Pegawai Non ASN
 - c. Wilayah Kerja Kabupaten Tana Tidung 2 orang ASN dan 2 orang Pegawai Non ASN
 - d. Wilayah Kerja Pulau Bunyu 3 orang ASN
 - e. Wilayah Kerja Nunukan 3 orang ASN dan 4 orang Pegawai Non ASN
 - f. Wilayah Kerja Sebatik 3 orang ASN dan 1 orang Pegawai Non ASN
 - g. Wilayah Kerja Malinau 4 orang ASN

I.4 Potensi, Isu Strategis Dan Permasalahan

1. Kewenangan
 - a. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
 - 1) Terkait prasarana merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan;
 - 2) Terkait jalan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (sekarang bernama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);
 - b. Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009 telah dapat diselesaikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian masih terdapat Petunjuk Teknis yang masih harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang.
 - c. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - 1) Pembagian urusan pemerintahan Bidang Perhubungan, untuk Pemerintah Pusat yaitu Penyelenggaraan Keselamatan dan

Keamanan Pelayaran dan Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen);

- 2) Komitmen Pemda dalam mendukung Pembangunan Prasarana Sub Sektor Perhubungan Darat, seperti ketersediaan/pembebasan lahan untuk jalan akses.

d. PM No. 122 Tahun 2018

Yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan dalam Transportasi Penyeberangan adalah sebagai berikut:

- 1) Keselamatan dan Keamanan Pelayaran TSDP;
- 2) Keselamatan dan Keamanan Angkutan di Perairan, Pelabuhan, Perlindungan Lingkungan Maritim.

2. Anggaran

Pada tahun 2025, terdapat perbedaan yang cukup besar antara pagu kebutuhan usulan dengan alokasi anggaran, sementara tugas yang diamanahkan begitu besar sehingga Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara hanya dapat memenuhi sebagian kebutuhan terhadap prasarana dan sarana perhubungan darat.

3. Isu strategis

Isu Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara adalah:

1. Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Perintis Penyeberangan;
2. Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Perintis Jalan;
3. Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Perintis Barang;
4. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan di Wilayah Kalimantan Utara;
5. Peningkatan/ Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan;
6. Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Angkutan Penyeberangan;
7. Penataan dan pembinaan SDM transportasi darat;
8. Pembinaan terhadap ODOL (Over Dimension Over Loading);
9. Perencanaan anggaran dan proses pengadaan.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara Tahun 2025 adalah:

1. Rencana Strategis
2. Perjanjian Kinerja
3. Indikator Kinerja Program
4. Pengukuran Kinerja
5. Evaluasi Kinerja

I.5 Sistematika Laporan

Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) ini disusun dengan istematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Tugas Pokok dan Fungsi
 - I.2.1 Bagan Struktur Organisasi
- I.3 Sumber Daya Manusia
- I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan
- I.5 Sistematika Laporan
- I.6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis
 - I.6.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025
- I.7 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

- II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja
- II.2 Pengukuran Capaian Kinerja
 - II.2.1 SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi**
 - IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional
 - IKK1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda
 - IKK 1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan

IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi

II.2.2 SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal

IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan

IKK 7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

II.2.3 SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

IKK 4.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat

II.2.4 SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

II.3 Realisasi Anggaran

II.3.1 Alokasi Anggaran Tahun 2025

II.3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025

II.3.3 Analisis Atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

BAB III PENUTUP

III.1 Penutup

III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Lampiran

1. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
3. Rencana Aksi Tahun 2025;
4. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2025;
5. Lain – lain yang dianggap perlu.

I.6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara Tahun 2025 - 2029 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Ditjen Perhubungan Darat dalam kurun waktu 2025 - 2029 sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2025 - 2029 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan Ditjen Hubdat.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Guna mencapai sasaran, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memperhatikan konsep Balanced Score Card (BSC) dan prinsip manajemen kinerja dan sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025 - 2025, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Sasaran dan Indikator Kinerja Program Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara Tahun 2025 – 2029

Tabel I. 1 Pencapaian Sasaran Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara Tahun 2025 – 2029 (Tabel Realisasi 2020-2022 merupakan data BPTD Wilayah XVII Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dan Target 2023 merupakan target untuk BPTD Kelas III Kalimantan Utara)

N O	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUA N	TARGE T 2023	TARGE T 2024	TARGE T 2025
1	SK 1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase Layanan Angkutan Jalan Perintis	%	90	90	90
			IKK1.3	Persentase Layanan Angkutan Barang Prioritas Nasional (Subsidi	%	90	90	90

				Angkutan Barang)				
			IKK1. 5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	90	90	90
			IKK1. 6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	%	90	90	90
					Lokasi	1	7	11
2	SK 4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3. 1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90	90	90
					%	90	90	90
			IKK3. 5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	100	100
			IKK7 a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	80	80	80
					%	80	80	80
3	SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK4. 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	100	100	100

4	SK 1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggara an Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100	100	100
					Nilai	100	100	100

I.6.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan berdasarkan Indikator Kinerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ini ditetapkan rencana capaian kinerja tahun 2025 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara Tahun 2025 terdiri dari Indikator Kinerja Utama guna mencapai Sasaran dengan target yang akan dicapai. RKT Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

*Tabel I. 2 Rencana Kerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara
Tahun 2025*

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK Meningkatkan 1 konektivitas transportasi darat dan	IKK1.1 Persentase Layanan Angkutan Jalan Perintis	%	90

	keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	1
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	90
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	11
3	SK Meningkatnya	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90
	4 Keselamatan Transportasi Darat			
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100
		IKK7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	80

4	SK Meningkatkan 4 penunjang teknis transportasi darat	IKK4.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	100
5	SK Meningkatkan 5 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	IKK5.1 Tingkat Penyelenggaraa n Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100

I.7 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara merupakan kontrak kinerja antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Menteri Perhubungan dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2025 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran awal Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara sebesar Rp. 81.065.404.000,- . Uraian Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel I. 3 Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK Meningkatkan 1 konektivitas transportasi darat dan	IKK1.1 Persentase Layanan Angkutan Jalan Perintis	%	90

	keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	1
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	90
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	11
3	SK Meningkatnya	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90
	4 Keselamatan Transportasi Darat			
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100
		IKK7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	80

4	SK 4	Meningkatnya penunjang teknis transportasi darat	IKK4.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	100
5	SK 5	Meningkatnya Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	IKK5.1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100

Kegiatan

Anggaran

- | | | |
|---|-----|----------------|
| 1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat | Rp. | 34.789.195.000 |
| 2. Pelayanan Transportasi Darat | Rp. | 1.985.760.000 |
| 3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat | Rp. | 27.335.420.000 |
| 4. Penunjang Teknis Transportasi Darat | Rp. | 4.101.000.000 |
| 5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat | Rp. | 6.208.439.000 |
| 6. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat | Rp. | 6.645.590.000 |



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja

Setiap penyelenggara SAKIP melakukan Pengukuran Kinerja yang diharapkan mampu menggambarkan posisi kinerja dari tingkat satuan kerja hingga tingkat kementerian. Cakupan Pengukuran Kinerja meliputi :

- a. Sasaran Kegiatan;
- b. Indikator Kinerja Kegiatan;
- c. Target;
- d. Realisasi;
- e. Pagu anggaran;
- f. Realisasi anggaran.

II.2 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web e- Performance yang menyediakan fasilitas Inputting, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan III mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan reward atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing.

Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu

materi yang direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana gilirannya dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dimasa mendatang.

Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Persentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Program adalah sebagai berikut:

Persentase Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara Tahun 2024

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran

capaian kinerja meliputi:

1. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 terhadap target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Program Tahun 2024;
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 Dalam Draft Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara Tahun 2020-2024.

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja. Untuk mewujudkan 5 (lima) tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara 2020-2024, bermuara pada terwujudnya 4 (empat) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai pada periode 2020- 2024.

Tabel II. 1 Pengukuran Kinerja Balai Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	Q2		
				T	R	C
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi					61,77%
IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	90	90	26,08	28,97%
IKK 1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	1	1	1	100%
IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	90	90	16,33	18,14%
IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	11	11	11	100%
SK4	Meningkatnya Keselamatan transportasi darat					21,39%
IKK 3.1	Persentase Perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90	90	57,76	64,17%
IKK 3.5	Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	orang	100	100	0	0%
IKK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80	80	0	0%
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat					6,13%
IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	nilai	100	100	6,13	6,13%
SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel					46,25%
IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	nilai	100	100	46,25	46,25%
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Kegiatan						33,88%

Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	40,4%
--	--------------

Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKK≥100%)	
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% (0%≤IKK<100%)	

Selama tahun 2024, ada 4 Sasaran Kegiatan (SK) dan di dalamnya ada 9 IKK Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara. Penjelasan capaian IKK untuk setiap Sasaran Kegiatan adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Perhubungan yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Draft Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat maupun pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara Tahun 2025-2026.

Kegiatan pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat padakesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam IKK membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara.

Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Yaitu:

1. IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan
2. IKK 1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda
3. IKK 1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan
4. IKK 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi

a. IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional

a. 1 Definisi Indikator Kinerja

Pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut.

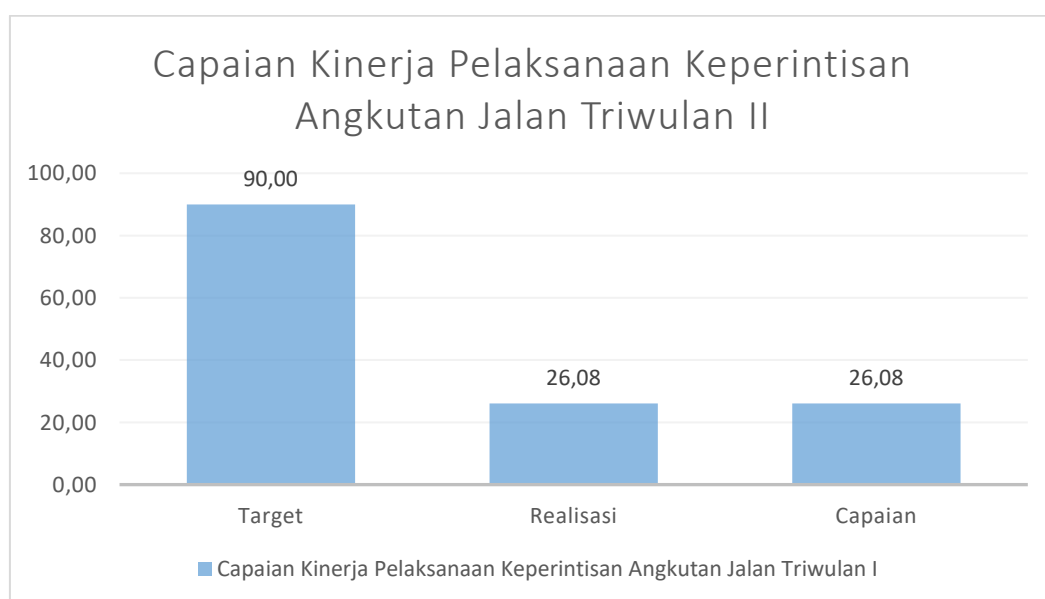
Capaian kinerja Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan.

Untuk menghitung Indikator Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase pelaksanaan keperintisan Angkutan Jalan} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a. 2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja terhadap revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional Triwulan II tahun 2025 sebesar 26,08%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar II.1 Grafik Capaian IKK Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional tahun 2025. Berdasarkan laporan progres pelaksanaan penyelenggaraan layanan angkutan jalan perintis mulai menunjukkan kenaikan untuk realisasi setiap trayek yang dilayani hingga bulan maret dengan capaian nilai 26,08%.



Gambar II. 1 Grafik Capaian IKK Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2025

a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Dasar Hukum

Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.5647/AJ.501/DRJD/2020 tanggal 20 November 2020 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2021, lalu di revisi dalam Salinan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.550/AJ/501/DRJD/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.5647/AJ.501/DRJD/2020 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2021, target trayek pelayanan Angkutan Jalan Perintis adalah sebesar 325 trayek.

- Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional terhadap konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi memiliki target 90% yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan. Sepanjang Triwulan II tahun 2025 tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) 2025.

Dari jumlah trayek dalam Salinan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.550/AJ/501/DRJD/2021 sebanyak 325 diantaranya terdapat 5 (lima) trayek di Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana yang tertuang dalam tabel berikut :

Tabel II. 2 Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

No	Provinsi	Trayek yang Dilayani
1	2	3
1	Kalimantan Utara	Tanjung Selor – Tideng Pale
2		Malinau – Salang
3		Tanjung Selor – Long Tungu
4		Tanjung Selor – Mangkupadi
5		KTT - Malinau

Terdapat 5 trayek yang beroperasi di tahun 2025 pada bulan Januari sudah dilakukan kontrak akan tetapi pada akhir Januari terdapat Intruksi Presiden untuk dilakukannya penundaan atau penghentian sementara kontrak guna efisiensi atau

penghematan anggaran sehingga untuk operasional kegiatan perintis jalan berhenti sementara sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Akan tetapi pada bulan Maret sudah beroperasi normal.

- Faktor Keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional antara lain:

- 1) Dipengaruhi oleh komitmen antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara dan pemerintah daerah dalam kegiatan pengembangan dan peningkatan pelayanan keperintisan angkutan jalan;
- 2) Perencanaan yang matang dalam menentukan trayek yang akan dilayani oleh angkutan perintis tersebut;
- 3) Minat masyarakat yang tinggi terhadap keberadaan angkutan perintis tersebut;
- 4) Angkutan keperintisan menjadi salah satu pilih transportasi yang dengan biaya yang terjangkau.

- Faktor Kegagalan

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional antara lain:

1. Kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan perintis yang telah disediakan
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya angkutan keperintisan
3. Kendala dalam mendapatkan BBM Bersubsidi karena kelangkaan di beberapa wilayah yang dilayani angkutan perintis sehingga harus menggunakan BBM Non-Subsidi
4. Kendala dalam melaksanakan operasional keperintisan di wilayah seular dikarenakan adanya penolakan oleh beberapa masyarakat yang memiliki profesi sebagai pengemudi travel
5. Makin maraknya mobil travel ilegal dengan kemudahan aksesnya.
6. Sebagian besar akses jalan menuju daerah yang dijangkau oleh angkutan perintis ini masih rusak dan sulit ditempuh.
7. Faktor cuaca maupun kondisi geografis dari daerah yang dijangkau angkutan perintis

- Perhitungan Realisasi Kinerja

Rata-rata Persentase Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2025 yang telah dilaksanakan oleh BPTD Kelas III Kalimantan Utara sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar 26,08% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel II. 3 Progres Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Provinsi Kalimantan Utara Triwulan II Tahun 2025

No	Trayek	Jumlah Trip /Tahun	Realisasi (Trip)			Total Realisasi (Trip)	Persentase (%)
			Apr	Mei	Jun		
1	Tanjung Selor – Tideng Pale	636	60	61	60	181	28,45%
2	Malinau – Salang	634	60	62	60	182	28,7%
3	Tanjung Selor – Long Tunggu	1156	83	112	118	313	27,07%
4	Tanjung Selor – Magkupadi	1172	86	120	118	324	27,64%
5	KTT - Malinau	1172	77	124	120	321	27,38%
Jumlah		4770	366	479	476	1321	27,69%

Realisasi Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\%Realisasi = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$\%Realisasi = \frac{1321}{4770} \times 100\% = 27,69\%$$

- Perhitungan Capaian Kinerja

Capaian Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu tercapainya target perjalanan pulang pergi (rit) dan kebermanfaatan dalam satu tahun pelayanan. Capaian rit untuk masing-masing trayek dapat dilihat pada tabel berikut:

$$\%Capaian = \frac{\%Realisasi}{\%Target} \times 100\%$$

$$\%Realisasi = \frac{27,69\%}{90\%} \times 100\% = 30,76\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional Triwulan II Tahun 2025 yaitu memiliki target keuangan senilai Rp. 5.346.849.000 dengan realisasi di Tahun 2025 Rp. 1.392.405.502 atau mencapai 26,08%.

a. 4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Perencanaan yang komprehensif dalam menentukan rute / trayek angkutan perintis di Provinsi Kalimantan Utara dengan memperhatikan RPJMN, Renstra, serta kebutuhan masyarakat terhadap layanan angkutan perintis di lapangan.
2. Komitmen antara Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam kegiatan peningkatan konektivitas transportasi darat terutama di daerah-daerah terisolir dan belum terlayani angkutan umum.
3. Dapat terus Mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalulintas dalam pelayanan jasa angkutan umum.
4. Meningkatkan kualitas layanan dari moda angkutan darat.
5. Dapat terus Mewujudkan pelayanan jasa angkutan yang handal.
6. Selalu Menciptakan rasa nyaman dan efisiensi terhadap pengguna jasa angkutan umum.
7. Dapat Mewujudkan konektivitas transportasi darat.

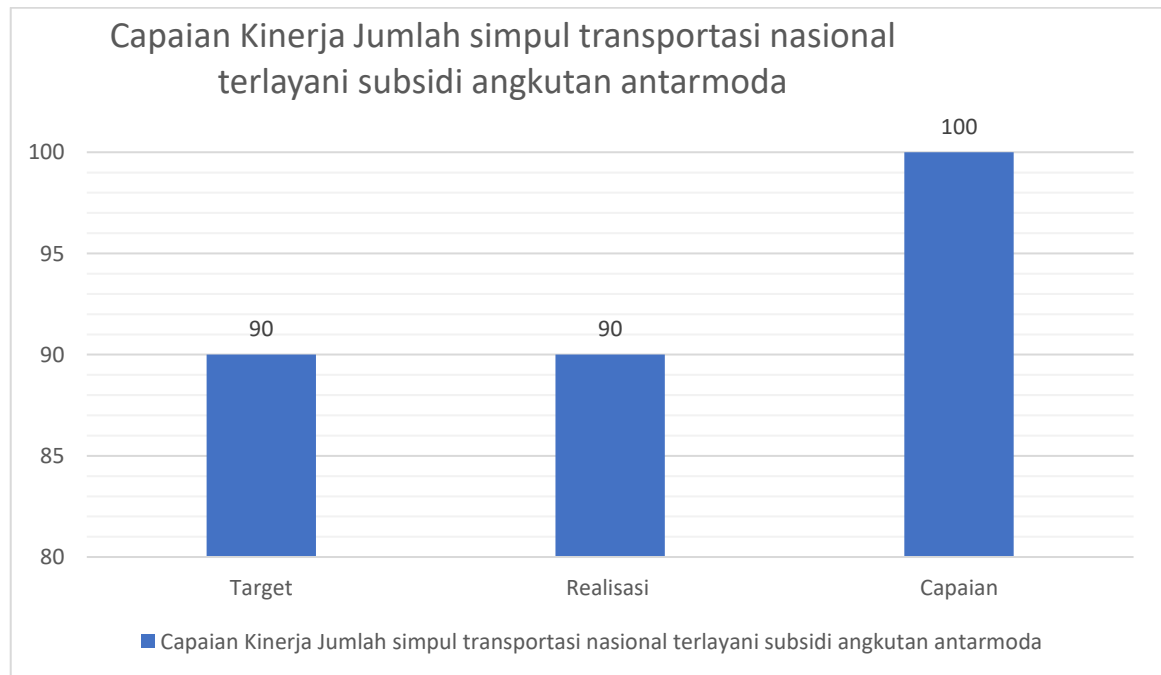
b. IKK 1.2 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda

a.1. Definisi Indikator Kerja

Jaringan Lintas Angkutan Barang Perintis dalam rangka penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di jalan dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan sesuai dengan KP-DRJD 8824 Tahun 2023. BPTD Kalimantan Utara melayani subsidi Angkutan Barang Tol Laut Provinsi Kalimantan Utara dari pelabuhan Nunukan – Ibu Kota Kabupaten Nunukan dengan Jarak Tempuh Tujuh Kilo Meter.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja terhadap revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda Triwulan II tahun 2025 sebesar 1 jika dibanding target PK tahun 2025 sebesar 1 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada gambar II.2 Grafik Capaian IKK jumlah layanan angkutan barang yang beroperasi.



Gambar II. 2 Grafik Capaian IKK Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Dasar Hukum

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 8824 Tahun 2023 Tentang Jaringan lintas angkutan barang perintis dalam rangka penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan untuk barang di jalan dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. Dimulai dari Pelabuhan Nunukan – Ibu Kota Kabupaten Nunukan Dengan Jarak Tujuh Kilo Meter.

- Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda terhadap konektivitas

transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi memiliki target 1 Lokasi yang diperoleh dari capaian terhadap revisi PK dan berdasarkan arahan pimpinan.

- Faktor Keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda antara lain:

1. Dipengaruhi oleh komitmen antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara dan pemerintah daerah dalam kegiatan pengembangan dan peningkatan pelayanan keperintisan angkutan barang.
2. Masih diperlukannya angkutan keperintisan di daerah yang terluar dan tertinggal.
3. Angkutan keperintisan menjadi salah satu bantuan subsidi yang sangat membantu di daerah tersebut.

- Faktor Kegagalan

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda antara lain:

1. Kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan perintis yang telah disediakan;
2. Ketidaktahuan masyarakat terhadap pelayanan keperintisan angkutan barang.

- Realisasi Kinerja

Realisasi Indikator Kinerja kegiatan angkutan barang yang beroperasi tahun 2025 terhadap target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\%Realisasi = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$\%Realisasi = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

- Capaian Kinerja

Capaian Indikator Kinerja kegiatan angkutan barang yang beroperasi tahun 2025 terhadap target perjanjian kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = 1 \times 100\% = 100\%$$

- Realisasi Anggaran

Adapun anggaran terkait Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda tahun 2025 yaitu memiliki target keuangan senilai Rp. 6.798.180.000 Dengan realisasi di Triwulan II tahun 2025 sebesar Rp. 2.340.428.865 Atau mencapai 34,43%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Meningkatkan keamanan bagi pengguna perintis angkutan barang
2. Meningkatkan kemampuan pelayanan guna mengantisipasi kebutuhan dimasa yang akan datang
3. Meningkatkan minat masyarakat agar lebih banyak menggunakan perintis angkutan barang

c. IKK 1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan

a.1. Definisi Indikator Kerja

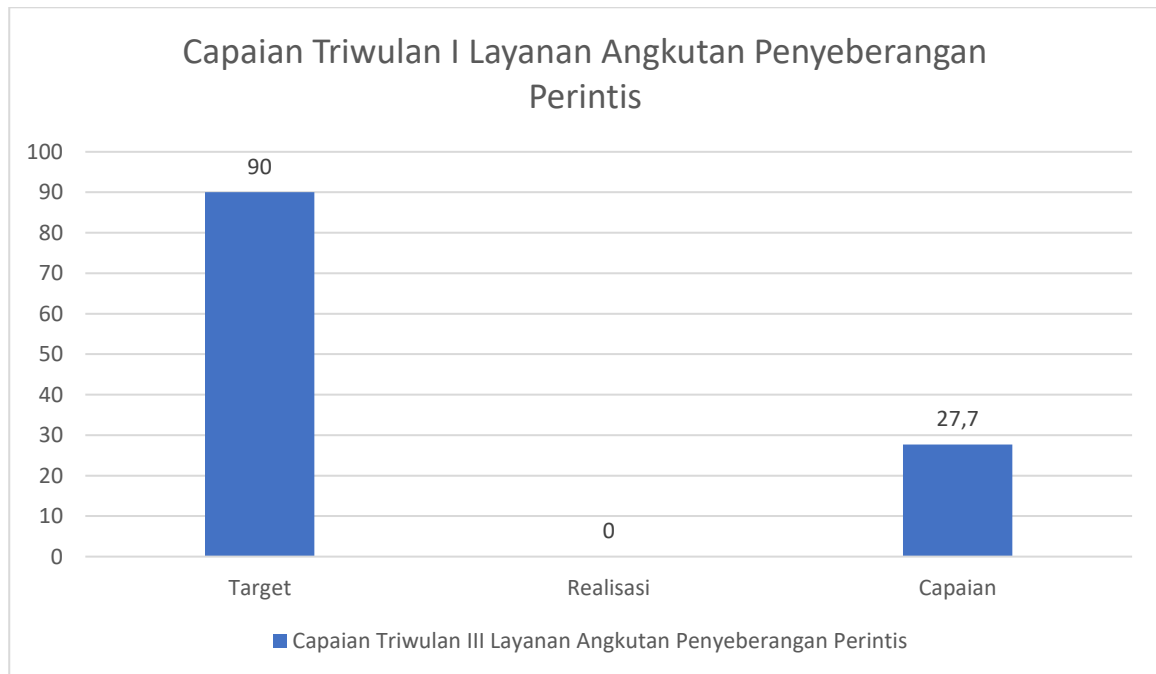
Pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan merupakan kegiatan BPTD Kelas III Kalimantan Utara yang saat ini bertugas untuk melakukan pengawasan operasional harian dan berkala terhadap kapal SDP agar penyelenggaraannya berjalan sesuai aturan dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

Persentase capaian kinerja pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah trip Penyeberangan yang terealisasi Dengan target yang telah ditetapkan. Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan digunakan rumus sebagai berikut:

$$\%Realisasi = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan Triwulan II tahun 2025 sebesar 70 trip jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 90% maka capaian kinerja mencapai 27,7%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar II.3 Grafik Capaian IKK Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan.



Gambar II. 3 Grafik Capaian IKK Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- Dasar Hukum

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.4550/AP.204/DRJD/2019 Tanggal 04 November 2019 Tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun 2020, terdapat 253 (Dua Ratus Lima Puluh Tiga) lintas penyeberangan perintis di seluruh Indonesia.

- Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Dari jumlah trayek dalam Salinan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.550/AJ/501/DRJD/2021 sebanyak 325 diantaranya terdapat 3 Lintasan yang melayani angkutan penyeberangan perintis di Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana yang tertuang dalam tabel berikut:

Tabel II. 4 Lintasan Angkutan Perintis Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

No	Provinsi	Lintasan yang di layani
1	2	3
1	Kalimantan Utara	Tarakan - Nunukan
2		Nunukan - Simenggaris
3		Tarakan - Tolitoli

Rata-rata persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan Tahun 2025 yang telah dilaksanakan oleh BPTD Kelas III Kalimantan Utara sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar 16,33% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel II. 5 Progres Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Tahun 2025

NO	Lintasan	Nama Kapal	Jumlah Trip /Tahun	Realisasi (Trip)			Total Realisasi (Trip)	Persentase (%)
				Apr	Mei	Jun		
1	Tarakan - Nunukan	KMP. Manta II	156	21	26	0	47	30,12%
2	Nunukan - Simenggaris	KMP. Manta II	48	10	8	0	18	37,5%
3	Tarakan - Tolitoli	KMP. Julung-julung	48	11	10	0	21	43,75%
Jumlah			252	42	44	0	86	34,12%

- Faktor Keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Persentase pelaksanaan Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi antara lain:

1. Harga tiket yang kompetitif sehingga meringankan masyarakat
2. Jalur yang dilayani untuk masyarakat yang terisolir
3. Kepastian jam operasioanal Keperintisan Angkutan Penyeberangan
4. Satu-satunya pilihan moda transportasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan.

- Faktor Kegagalan

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Persentase pelaksanaan Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi antara lain:

1. Faktor cuaca seperti tingginya ombak laut
2. Jadwal Oprasional tidak Terlalu banyak
3. Masyarakat masih belum mengetahui tentang Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan.

- Realisasi Kinerja

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan keperintisan angkutan penyebrangan yang beroperasi Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\%Realisasi = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$\%Realisasi = \frac{86}{252} \times 100\% = 34,12\%$$

- Capaian Kinerja

Capaian kinerja persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyebrngan tahun 2025 sebesar 16,33%. Dimana hasil persentase capaian berasal dari realisasi dibagi target dikali 100 persen. Artinya nilai capaian berhasil memenuhi target. Trayek Kegiatan perintis angkutan barang 2025 masih sama dengan tahun 2024, pada bulan Januari sudah dilakukan kontrak akan tetapi pada akhir Januari terdapat Intruksi Presiden untuk dilakukannya penundaan atau penghentian sementara kontrak guna efisiensi atau penghematan anggaran sehingga untuk operasional kegiatan perintis angkutan barang berhenti dan pada bulan maret sudah beroperasi seperti biasa.

- Realisasi anggaran

Adapun anggaran terkait perintis angkutan penyebrangan yang beroperasi Tahun 2025 yaitu memiliki target keuangan senilai Rp. 19.144.166.000,- dengan realisasi di Tahun 2025 Rp. 3.126.828.163,- atau mencapai 16,33%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Memenuhi persyaratan teknis laik laut dan SPM kapal penyeberangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Menghubungkan daerah yang belum memiliki moda transportasi lain secara memadai;
3. Menghubungkan daerah yang secara komersial belum menguntungkan untuk dilayani pelayaran niaga;
4. Melaksanakan standar pelayanan sesuai SOP yang telah dibuat.

d. IKK 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi

a.1. Definisi Indikator Kerja

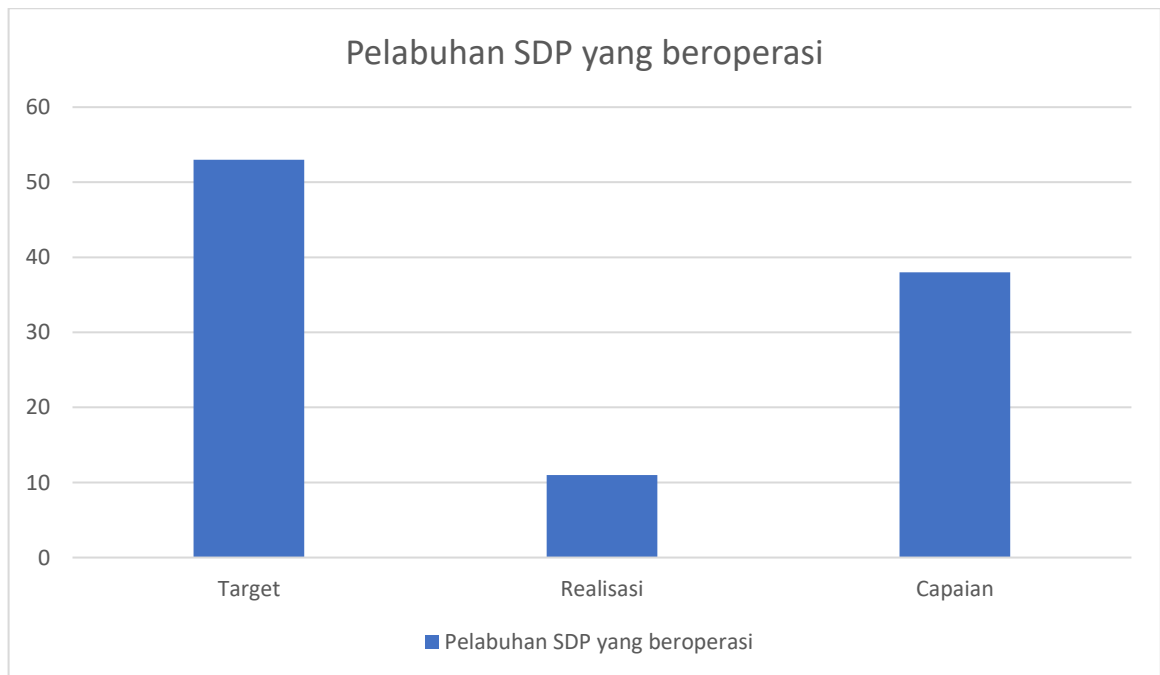
BPTD Kelas III Kalimantan Utara memiliki Pelabuhan Penyeberangan SDP beserta seluruh staf yang berfungsi melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh Pelabuhan Penyeberangan terhadap keselamatan transportasi angkutan umum di darat berjalan dengan benar serta mengevaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM. Capaian kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja 2025

Capaian kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi Triwulan II tahun 2025 sebesar 53 lokasi jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 11 lokasi maka capaian kinerja mencapai 38,71%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar II.4 Grafik Capaian IKK Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi.



Gambar II. 4 Grafik Capaian IKK Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi.

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, BPTD Kelas III Provinsi Kalimantan Utara terdapat 6 Satuan Pelayanan Pelabuhan SDP, namun sampai dengan tahun 2025 Balai Pengelola Transportasi Darat, BPTD Kelas III Provinsi Kalimantan Utara mengawasi 6 Wilayah Kerja dengan 11 Pelabuhan yang beroperasi. Adapun Pelabuhan tersebut antara lain, sebagai berikut:

Tabel II. 6 Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan di Kalimantan Utara

No	Provinsi	Pelabuhan yang Beroperasi
1	2	3
1	Kalimantan Utara	Pelabuhan Sungai Tengkeyu, Tarakan
2		Pelabuhan Penyeberangan Juata, Tarakan
3		Pelabuhan Sungai Liem Hie Djung, Nunukan
4		Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun, Nunukan
5		Pelabuhan Penyeberangan Sei Manggaris, Nunukan
6		Pelabuhan Sungai Sei Nyamuk, Nunukan
7		Pelabuhan Penyeberangan Liang Bunyu, Sebatik

8		Pelabuhan Penyeberangan Sebawang, kabupaten Tana Tidung
9		Pelabuhan Sungai Tideng Pale, kabupaten Tana Tidung
10		Pelabuhan Penyeberangan Pulau Bunyu
11		Pelabuhan Sungai Kayan, Tanjung Selor

- Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, BPTD Kelas III Provinsi Kalimantan Utara terdapat 6 Pelabuhan Sungai, Danau dan penyeberangan, yaitu:

1. Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun
2. Pelabuhan Penyeberangan Juata
3. Pelabuhan Sungai Malinau Kota
4. Pelabuhan Sungai Djang Kida
5. Pelabuhan Sungai Sei Ular

Namun pada kenyataannya terdapat 11 Pelabuhan yang beroperasi di BPTD Kelas III Provinsi Kalimantan Utara, yaitu:

1. Pelabuhan Sungai Tengkeyu, Tarakan
2. Pelabuhan Penyeberangan Juata, Tarakan
3. Pelabuhan Sungai Liem Hie Djung, Nunukan
4. Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun, Nunukan
5. Pelabuhan Penyeberangan Sei Manggaris, Nunukan
6. Pelabuhan Sungai Sei Nyamuk, Nunukan
7. Pelabuhan Penyeberangan Liang Bunyu, Sebatik
8. Pelabuhan Penyeberangan Sebawang, kabupaten Tana Tidung
9. Pelabuhan Sungai Tideng Pale, kabupaten Tana Tidung
10. Pelabuhan Penyeberangan Pulau Bunyu
11. Pelabuhan Sungai Kayan, Tanjung Selor

- Faktor Keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Persentase pelaksanaan Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi antara lain:

1. Petugas yang kompeten dibidangnya

2. Kordinasi yang selalu terjalin dengan stakeholder terkait
3. Selalu melaksanakan evaluasi kerja
4. Operasional pelabuhan yang baik.
5. Perencanaan yang matang dalam pembangunan Pelabuhan SDP.
6. Anggaran yang terserap dengan baik.

- Faktor Kegagalan

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Persentase pelaksanaan Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi antara lain:

1. Kurangnnya SDM yang ada
2. Keadaan Alam Sering menjadi masalah yang sering terjadi di sekitar kantor
3. masih perlu peningkatan fasilitas kantor
4. Tempat sulit Dijangkau

- Realisasi Kinerja

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\%Realisasi = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$\%Realisasi = \frac{11}{53} \times 100\% = 20,75\%$$

- Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi tahun 2025 sebesar %. Dimana hasil persentase capaian berasal dari realisasi dibagi target 100 persen. Artinya nilai capaian berhasil memenuhi target.

$$\%Capaian = \frac{11}{53} \times 100\% = 20,75\%$$

- Realisasi Anggaran

Adapun anggaran terkait Operasional Pelabuhan SDP yang beroperasi Tahun 2025 yaitu memiliki target keuangan senilai Rp. 1.985.760.000 dengan realisasi di Tahun 2025 Rp. 768.653.100 atau mencapai 38,71%.

a.4.Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Terpenuhi persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di sungai danau dan penyeberangan;
2. Peningkatan keamanan dan ketertiban pelabuhan SDP;
3. Meningkatkan kompetensi pegawai dengan mengikuti diklat;
4. Menjamin kesesuaian spesifikasi teknis fisik kendaraan.

Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2 Diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Yaitu:

1. IKK 3.1 Persentase Perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal
2. IKK 3.5 Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan
3. IKK 7.a Persentase standarisasi pengujian berkala Kendaraan bermotor

a. IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal

a.1. Definisi Indikator Kinerja

BPTD Kelas III Kalimantan Utara memiliki tugas dan fungsi untuk menginventaris kebutuhan infrastruktur keselamatan jalan, membangun dan memfasilitasi infrastruktur keselamatan jalan, serta melakukan monitoring terhadap fasilitas jalan yang telah terpasang sesuai kondisi ideal. Kebutuhan Perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pemenuhan kebutuhan Perlengkapan Jalan merupakan perhitungan dari 10 (sepuluh) item Perlengkapan Jalan dengan satuan yang berbeda.

Adapun 10 (sepuluh) item dimaksud meliputi :

- 1) Alat Penerangan Jalan;
- 2) Alat Pemberi Isyarat lalu Lintas smart system;
- 3) Marka Jalan;
- 4) Lampu Peringatan Pemakai Jalan;

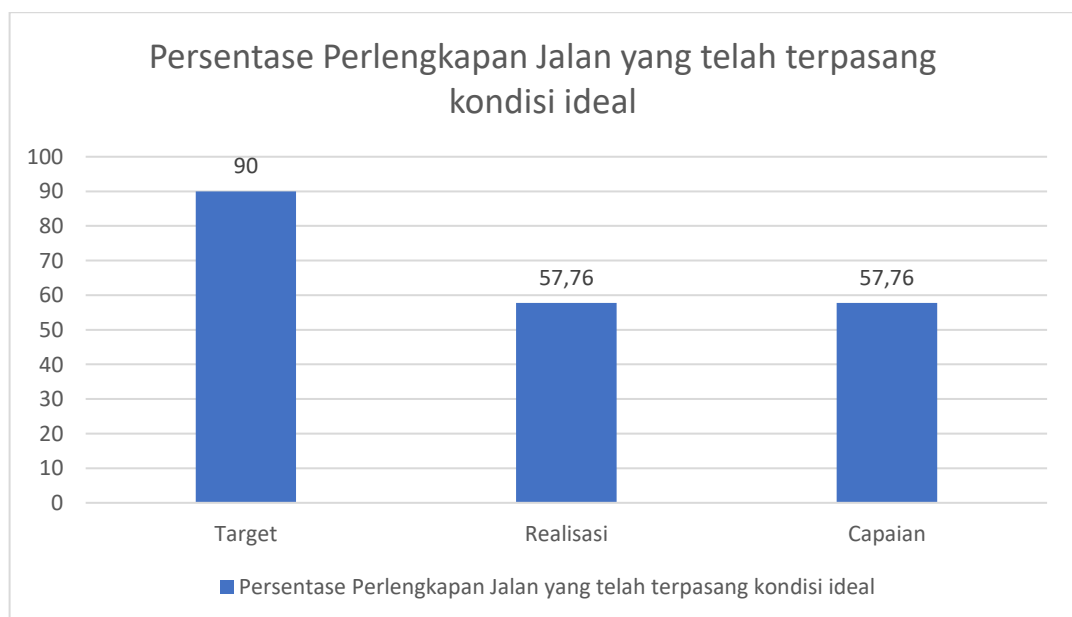
- 5) Paku Jalan;
- 6) Rambu Lalu Lintas;
- 7) Rambu Tiang Gawang;
- 8) Rambu Tiang F;
- 9) Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan;
- 10)Pagar Pengaman Jalan;

Capaian kinerja Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan. Untuk menghitung Indikator Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal Triwulan II tahun 2025 sebesar jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 90% maka capaian kinerja mencapai 57,76%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar II.5 Grafik Capaian IKK Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal.



Gambar II. 5 Grafik Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- Dasar Hukum

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal berdasarkan Perjiden SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 Tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan.

- Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terhadap Keselamatan transportasi darat memiliki target 90% yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan. Sepanjang tahun 2025 tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) 2025.

- Faktor Keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal antara lain:

1. Kondisi lapangan yang mendukung, seperti cuaca
2. Kontrak pekerjaan tepat waktu
3. Kesesuaian dengan kebutuhan

- Faktor Kegagalan

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal antara lain:

1. Kondisi alam yang tidak memungkinkan (Cuaca buruk)
2. Pekerjaan tidak selesai dengan waktu yang telah ditentukan
3. Perkiraan Tidak sesuai dengan kebutuhan

- Realisasi Kinerja

Realisasi Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal memiliki realisasi 57,76%. Untuk menghitung Indikator Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Capaian Kinerja

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$Capaian = \frac{57,76}{80} \times 100\% = 72,2\%$$

- Realisasi Anggaran

Adapun anggaran terkait Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal Tahun 2025 yaitu memiliki target keuangan senilai Rp. 26.035.420.000,- dengan realisasi di Triwulan II Tahun 2025 Rp. 15.038.26.606,- atau mencapai 57,76%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan;
2. Mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta memberikan kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas;
3. Mewujudkan jalan yang berkeselamatan.

b. IKK 3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja

BPTD Kelas III Kalimantan Utara memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan himbauan Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada para masyarakat melalui kegiatan pekan nasional keselamatan jalan.

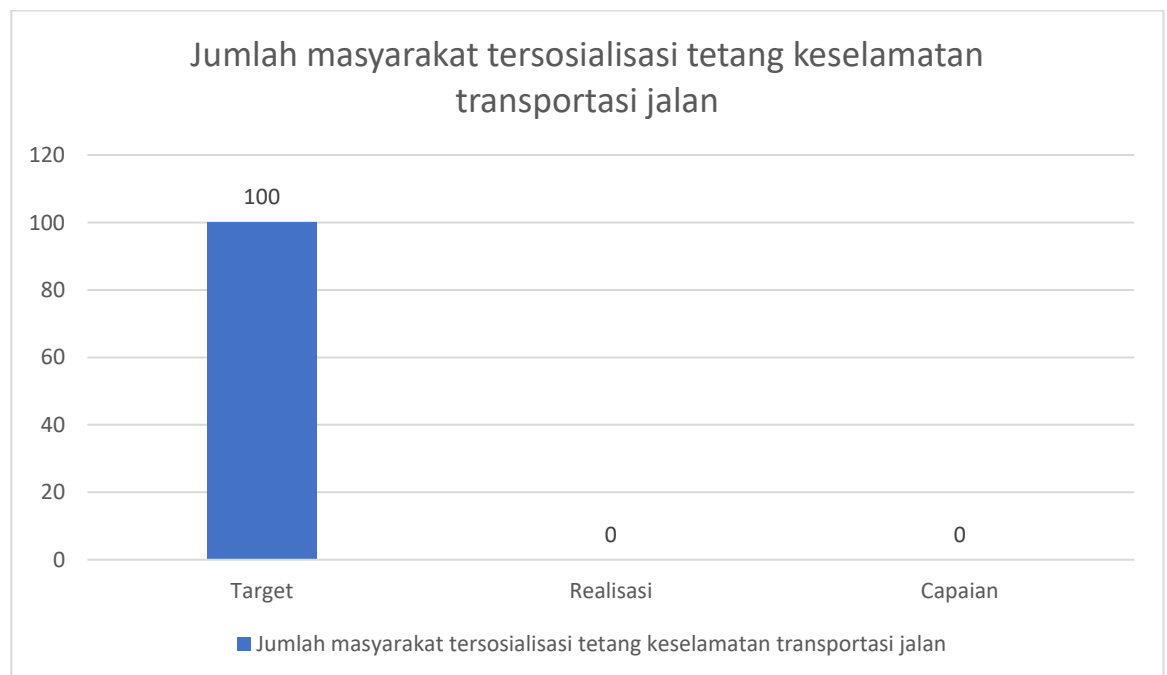
Capaian kinerja Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan.

Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja 2024

Capaian kinerja Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Triwulan II Tahun 2025 sebesar 0% jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 100 orang maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar II.6 Grafik Capaian IKK Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan.



Gambar II. 6 Grafik Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan.

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- Dasar Hukum

Sesuai dengan Pasal 208 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, tentang Budaya Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan Ayat 2 Butir b “Sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Dan Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 3 tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan.

- Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2025, Indikator Kinerja Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Kecepatan terhadap Keselamatan transportasi darat memiliki target 100 orang yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

- Faktor Keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan antara lain:

1. Sosialisasi tentang acara Pekan Keselamatan Jalan pada media sosial atau spanduk;
2. Tersedianya anggaran yang memadai;
3. Kerjasama Tim panitia pelaksanaan Pekan Nasional Keselamatan Jalan.

- Faktor Kegagalan

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan antara lain:

1. Tidak tersampainya informasi keselamatan karena kurangnya informasi tentang sosialisasi;
2. Kurangnya minat Masyarakat akan pentingnya keselamatan berlalu lintas;
3. Panitia penyelenggara kurang berpengalaman.

- Realisasi Kinerja

Persentase capaian Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan tahun anggaran 2025 belum terealisasi karena sosialisasi pekan keselamatan jalan direncanakan akan dilaksanakan pada minggu pertama bulan Mei.

- Capaian Kinerja

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\text{Capaian} = \frac{0}{100} \times 100\% = 0\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Tahun 2025 yaitu memiliki target keuangan senilai Rp. 200.000.000,- dengan realisasi di Triwulan II Tahun 2025 Rp. 0,- atau mencapai 0%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Merencanakan kegiatan sosialisasi keselamatan transportasi jalan dengan matang;
2. Memberikan hiburan yang menarik dalam acara sosialisasi keselamatan transportasi jalan;
3. Menjalin kerjasama yang baik dengan instansi terkait demi terciptanya keberhasilan acara sosialisasi keselamatan transportasi jalan.

c. IKK 7a Persentase Standarisasi Pengujian Kendaraan Bermotor

a.1. Definisi Indikator Kinerja

BPTD Kelas III Kalimantan Utara memiliki tugas dan fungsi yang bertujuan melakukan pengawasan uji berkala untuk memastikan alat uji disetiap PKB laik fungsi berjalan sesuai SOP pada seluruh kab/kota yang ada di Kalimantan Utara.

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana yang telah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan bahwa Unit pelaksana Uji Berkala wajib melaksanakan pengujian setelah memperoleh akreditasi dan sertifikasi, menggunakan peralatan pengujian yang terkalibrasi dan dilengkapi dengan sistem informasi manajemen pengujian Kendaraan Bermotor yang terintegrasi dengan hasil uji berupa Bukti Lulus Uji Berkala Elektronik (BLU-E).

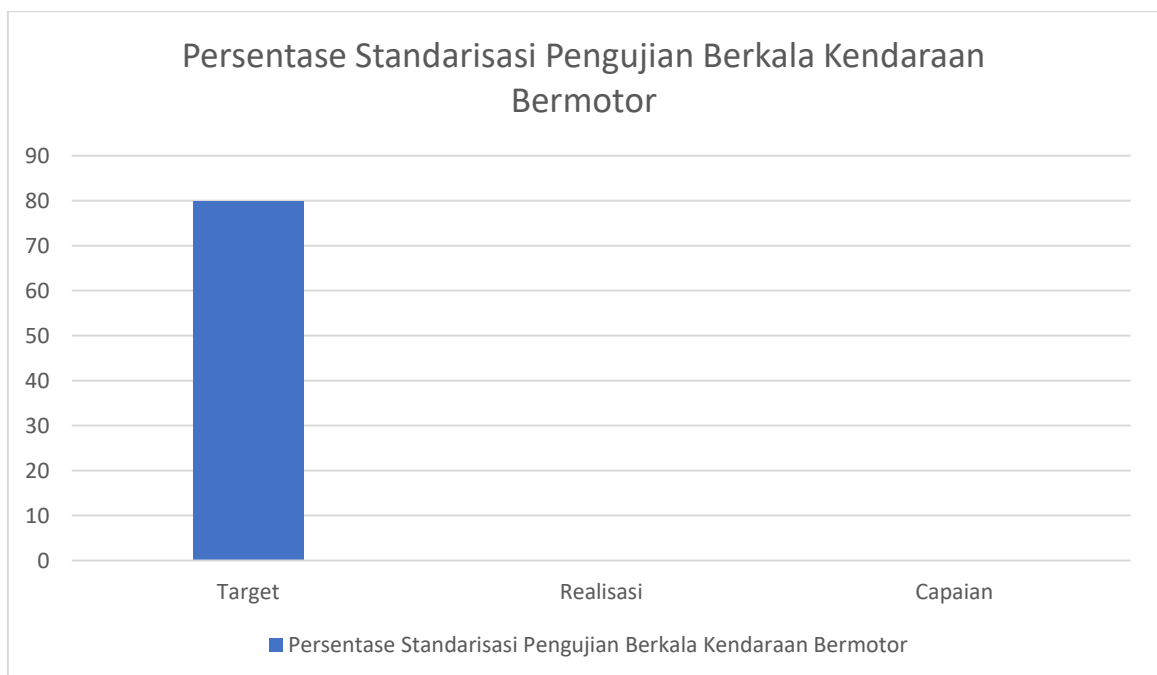
Standarisasi pengujian kendaraan bermotor dalam hal ini sebagai pemenuhan standar Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota dengan penetapan Akreditasi UPUBKB sebagai

bermotor adalah aspek pemenuhan pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian kendaraan bermotor yang ditetapkan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Capaian kinerja Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan

$$\text{Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja 2025

Capaian kinerja Presentase standarisasi pengujian kendaraan bermotor Triwulan II Tahun 2025 sebesar 0% jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 80% maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar II.7 Grafik Capaian IKK Presentase standarisasi pengujian kendaraan bermotor.



Gambar II. 7 Grafik Presentase standarisasi pengujian kendaraan bermotor.

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor menjelaskan, Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan

menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.

- Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2025, Indikator Kinerja Presentase standarisasi pengujian kendaraan bermotor terhadap Keselamatan transportasi darat memiliki target 80% yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

- Faktor Keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Presentase standarisasi pengujian kendaraan bermotor antara lain:

1. Permintaan dari Dishub Kab/ Kota yang ada di Kalimantan Utara;
2. Kelengkapan Alat uji yang akan di kalibrasi;
3. Pelaksanaan standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai Standar Operasional Prosedur standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor yang telah ditetapkan;
4. Fasilitas Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang memadai.

- Faktor Kegagalan

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Presentase standarisasi pengujian kendaraan bermotor antara lain:

1. SDM yang kurang memadai dan tidak memiliki kompetensi terhadap pengujian kendaraan bermotor;
2. Kurangnya perawatan terhadap peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor
3. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang belum memenuhi syarat akreditasi
4. Ketidakmampuan Dishub Kab/Kota untuk memenuhi Fasilitas dan Alat uji kendaraan bermotor.

- Realisasi Kinerja

Realisasi Persentase pelaksanaan standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor memiliki realisasi 0%. Untuk menghitung Indikator

Persentase pelaksanaan standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- **Capaian Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor tahun 2025 merupakan kegiatan kalibrasi alat uji pada pengujian kendaraan bermotor di 2 Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Utara yang mana pada Triwulan II ini belum melakukan kegiatan standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor.

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\text{Capaian} = \frac{0}{80} \times 100\% = 0\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor Tahun 2025 yaitu memiliki target keuangan senilai Rp.1.100.000.000,- dengan realisasi di Triwulan II Tahun 2025 Rp. 0,- atau mencapai 0%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Upaya untuk meningkatkan kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terciptanya deteksi pencapaian kondisi laik pakai untuk menjamin ketelitian, ketepatan alat ukur/uji dalam rangka peningkatan mutu pelayanan;
2. Menjamin peralatan alat ukur/uji yang digunakan harus sesuai spesifikasi yang di persyaratkan;
3. Melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai standar dan SOP yang telah ditentukan;
4. Terus meningkatkan kualitas SDM terkait pengujian kendaraan bermotor melalui Bimtek dan pelatihan – pelatihan.

Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

Pencapaian Sasaran Kegiatan 5 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu IKK 4.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

a. IKK 4.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat merupakan hasil kualitas Dukungan Teknis Transportasi Darat dengan menggunakan uraian bobot menyesuaikan dengan target BPTD Kelas III Kalimantan Utara. Salah satu bobot yang mempengaruhi yaitu tingkat penyerapan Anggaran Satuan Kerja dengan menyesuaikan realisasi anggaran Tahun 2025 BPTD Kelas III Kalimantan Utara. Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari:

- a) Aspek Perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), penginputan aplikasi e-performance;
- b) Aspek Kepegawaian (SDM) dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (Pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan disiplin;
- c) Aspek Keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja. Berikut adalah tabel perhitungan nilai bobot pada IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat;
- d) Aspek Hukum dan Kerjasama.

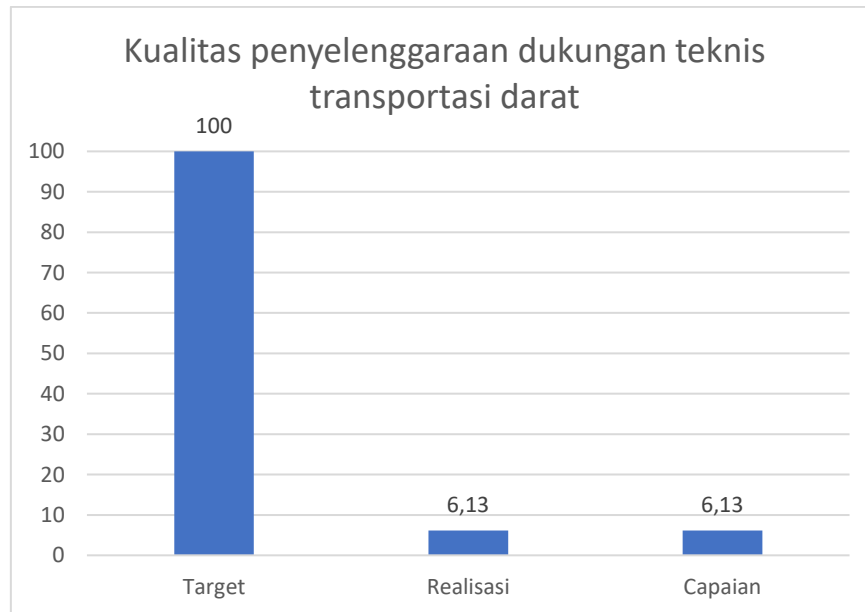
Capaian kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan, maka dari itu digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja tahun 2025

Capaian kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Triwulan II Tahun 2025 sebesar 6,13% jika dibandingkan dengan target PK 2025

sebesar 100 maka capaian kinerja mencapai 6,13%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar II.8 Grafik Capaian IKK Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat.



Gambar II. 8 Grafik Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat.

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- Dasar Hukum

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, maka telah ditetapkan sebagai dasar Penyelenggaraan Kinerja Kualitas dukungan teknis transportasi darat.

- Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terhadap Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat memiliki target senilai 100 yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

Penyelenggaraan Kinerja Kualitas dukungan teknis transportasi darat pada tahun 2025 telah dilakukan untuk kegiatan penunjang teknis. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu:

1. Penyusunan bahan RKA
2. Penyusunan SAKIP, LKIP dan Profil BPTD
3. Pengiriman Pegawai Diklat

4. Rapat Teknis, Koordinasi dan Konsolidasi
5. Monwas Hubdat
6. Kalibrasi alat uji;
7. Pengawasan Gakum;
8. Monev Angkutan Komersil dan Perintis
9. Pendataan dan Pengukuran Kapal Sungai dan Danau
10. Ramphcheck Kapal Penyeberangan
11. Monev Sarpras Ditjen Hubdat

- Faktor Keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat antara lain:

1. Kegiatan terlaksana dengan waktu yang sudah ditentukan
2. Terkoordinasikannya kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan dengan stakeholder terkait
3. SDM yang bersolidaritas
4. Kerjasama yang baik antar sesama pegawai dalam program penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat;
5. Penyerapan anggaran yang maksimal dan tepat guna;
6. Perencanaan yang matang terkait program penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat.

- Faktor Kegagalan

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat antara lain:

1. Kerjasama yang kurang baik antar pegawai dalam mendukung program penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat;
2. Kurangnya keterlibatan pimpinan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap program dukungan teknis transportasi darat.
3. Kurangnya SDM yang ada.

- Realisasi Kinerja

Realisasi kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan, maka dari itu digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- **Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\text{Capaian} = \frac{6,13}{100} \times 100\% = 2,08\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran kegiatan terkait Capaian Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2025 yaitu senilai Rp.4.101.000.000,- dengan realisasi di Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp. 251.459.188 atau mencapai 6,13%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Upaya untuk meningkatkan kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat di masa yang akan datang yaitu:

1. Meningkatkan Sistem Informasi Kepegawaian;
2. Melaksanakan pengelolaan naskah yang masuk dan keluar serta mengoreksi naskah dinas agar sesuai aturan;
3. Meningkatkan pengelolaan arsip baik inaktif maupun statis sesuai pola kearsipan;
4. Dapat menyelesaikan capaian laporan bulanan, triwulanan dan tahunan berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilakukan sebagai pertanggungjawaban tugas kepada atasan.

Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

a. IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

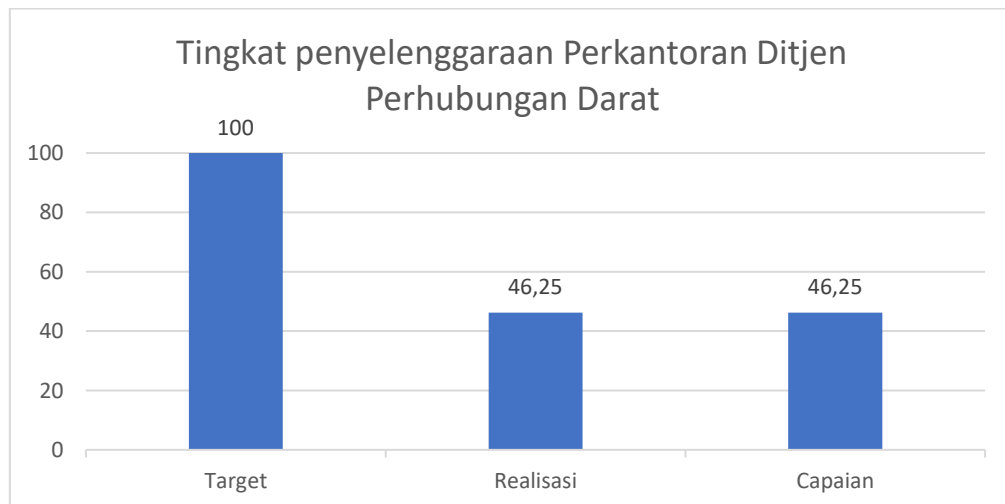
a.1. Definisi Indikator Kinerja

Capaian kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan, maka dari itu digunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Triwulan II Tahun 2025 sebesar 46,25 jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 100 maka capaian kinerja mencapai 46,25%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar II.9 Grafik Capaian IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat.



Gambar II. 9 Grafik Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat.

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- Dasar Hukum

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, maka telah ditetapkan sebagai dasar Penyelenggaraan Perkantoran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara pada tahun 2025.

- Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2025, Indikator Kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat terhadap meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat memiliki target senilai 100 yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara pada tahun 2025 telah dilakukan secara maksimal untuk tercapainya Manajemen pelayanan perkantoran terhadap seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai di Lingkungan BPTD Kelas III Kalimantan Utara. Adapun beberapa pelayanan perkantoran yang telah diserap, yaitu:

1. Operasional dan Pemeliharaan Kantor
2. Honorarium Satuan Kerja
3. Honorarium ULP/Pejabat Pengadaan/PPHP

- Faktor Keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

1. Adanya SDM yang berkompeten
2. Kegiatan yang ada di Kantor sudah terjadwal secara rutin
3. Evaluasi setiap bulan

- Faktor Kegagalan

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

1. Adanya pengurangan anggaran
2. Kurangnya SDM yang ada.

- Realisasi Kinerja

Realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan, maka dari itu digunakan rumus sebagai berikut:

Tabel II. 7 Realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

NO	URAIAN		BOBOT	NILAI
A	Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III dan IV		25%	
	1	Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon III	15	
	2	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon IV	10	
B	Tingkat Kepuasan Staf		25%	
C	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran		50%	
	1	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (nilai x)	20	
	2	Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (nilai y)	15	
	3	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet (nilai z)	15	

Cara Perhitungan:

- A. Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon III dan IV diukur melalui kuesioner;
- B. Tingkat Kepuasan Staf diukur melalui kuissoner;
- C. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran.

1. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi

$$x = \frac{\text{Jumlah Kursi dan Meja di kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan staf) di kantor}} \times 100\%$$
$$x = \frac{45}{45} \times 100\% = 100\%$$

2. Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop

$$y = \frac{\text{Jumlah PC atau Laptop di kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan staf) di kantor}} \times 100\%$$
$$y = \frac{2}{45} \times 100\% = 4,4 \%$$

3. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet

$$z = \frac{\text{Rata – rata kecepatan (unduh) di kantor}}{\text{Standar kecepatan internet (unduh) di kantor}} \times 100\%$$

- **Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\text{Capaian} = \frac{46,25}{100} \times 100\% = 46,25\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran kegiatan terkait Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 yaitu memiliki target keuangan senilai Rp. 12.854.029.000,- dengan realisasi di Triwulan II Tahun 2025 Rp. 5.945.068.731,- atau mencapai 46,25%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Pimpinan dapat melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing;
2. Dapat Memberikan kesimpulan dalam bentuk umpan balik sehingga dapat terus mengarahkan pencapaian visi dan misi sasaran yang telah ditetapkan;
3. Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi yang mampu menjamin arah pembangunan secara berkesinambungan.

II.3 Realisasi Anggaran

II.3.1 Alokasi Anggaran Tahun 2025

1. Pagu Anggaran

Pagu DIPA TA. 2025 pada triwulan ke II pagu sebesar Rp. 81.065.404.000, dengan rincian sebagai berikut:

a.1 Rincian Per Sumber Dana Tahun 2025

Tabel II. 8 Rincian per Sumber Dana Pagu Tahun 2025

NO	SUMBER DANA	PAGU ALOKASI (TW II)	REALISASI TW II	
		Rp	Rp	%
1	RUPIAH MURNI	78.780.404.000	28.865.113.155	36,64
2	PNBP	2.285.000.000	-	-
3	SBSN	-	-	-
TOTAL		81.065.404.000	28.865.113.155	35,61

a.2 Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2025

Tabel II. 9 Rincian per Jenis Belanja Pagu Tahun 2025

	JENIS BELANJA	PAGU ALOKASI (TW II)	REALISASI TW II	
		Rp	Rp	%
1	BELANJA PEGAWAI	6.645.590.000	3.505.433.213	52,75
2	BELANJA BARANG	55.577.487.000	17.219.575.886	30,98
3	BELANJA MODAL	18.842.327.000	8.140.104.056	43,20
TOTAL		81.065.404.000	13.301.533.085	35,61

a.3 Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran

Surat Pengesahan Revisi Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara berdasarkan Surat Kementerian Keuangan tanggal 2 Desember 2024 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690669/2025 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara TA. 2024 (DIPA awal).

2. Refocusing Anggaran Tahun 2025

a.1 Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2025

Tabel II. 10 Rincian Revisi per Sumber Dana Tahun 2025

	SUMBER DANA			JUMLAH
	RM	PNBP	SBSN	
PAGU AWAL	78.780.404.000	2.285.000.000	-	81.065.404.000
REVISI KE - 1	78.780.404.000	2.285.000.000	-	81.065.404.000
REVISI KE - 2	78.780.404.000	2.285.000.000	-	81.065.404.000
REVISI KE - 3	78.780.404.000	2.285.000.000	-	81.065.404.000
REVISI KE - 4	78.780.404.000	2.285.000.000	-	81.065.404.000
REVISI KE - 5	78.780.404.000	2.285.000.000	-	81.065.404.000
REVISI KE - 6	78.780.404.000	2.285.000.000	-	81.065.404.000
REVISI KE - 7	78.780.404.000	2.285.000.000	-	81.065.404.000
REVISI KE - 8	78.780.404.000	2.285.000.000	-	81.065.404.000
REVISI KE - 9	78.780.404.000	2.285.000.000	-	81.065.404.000

a.2 Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2025

Tabel II. 11 Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2025

	JENIS BELANJA			JUMLAH
	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	
PAGU AWAL	6.645.590.000	55.577.487.000	18.842.327.000	81.065.404.000
REVISI KE - 1	6.645.590.000	55.577.487.000	18.842.327.000	81.065.404.000
REVISI KE - 2	6.645.590.000	55.577.487.000	18.842.327.000	81.065.404.000
REVISI KE - 3	6.645.590.000	55.577.487.000	18.842.327.000	81.065.404.000
REVISI KE - 4	6.645.590.000	55.577.487.000	18.842.327.000	81.065.404.000
REVISI KE - 5	6.645.590.000	55.577.487.000	18.842.327.000	81.065.404.000
REVISI KE - 6	6.645.590.000	55.577.487.000	18.842.327.000	81.065.404.000
REVISI KE - 7	6.645.590.000	55.577.487.000	18.842.327.000	81.065.404.000
REVISI KE - 8	6.645.590.000	55.577.487.000	18.842.327.000	81.065.404.000
REVISI KE - 9	6.645.590.000	55.577.487.000	18.842.327.000	81.065.404.000

a.3 Rincian Realokasi Per Sasaran Kegiatan dan Kegiatan Tahun 2025

Tabel II. 12 Rincian Realokasi Per Sasaran Kegiatan dan Kegiatan Tahun 2025

	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN II
BELANJA PEGAWAI	6.645.590.000	6.645.590.000	6.645.590.000
BELANJA BARANG	55.577.487.000	55.577.487.000	55.577.487.000
RM	54.392.487.000	54.392.487.000	54.392.487.000
PNBP	1.185.000.000	1.185.000.000	1.185.000.000
BELANJA MODAL	18.842.327.000	18.842.327.000	18.842.327.000
RM	17.742.327.000	17.742.327.000	17.742.327.000
PNBP	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
SBSN	-	-	-
TOTAL	81.065.404.000	81.065.404.000	81.065.404.000

a.4. Rincian Realokasi Per Sasaran Kegiatan dan Kegiatan Tahun 2025

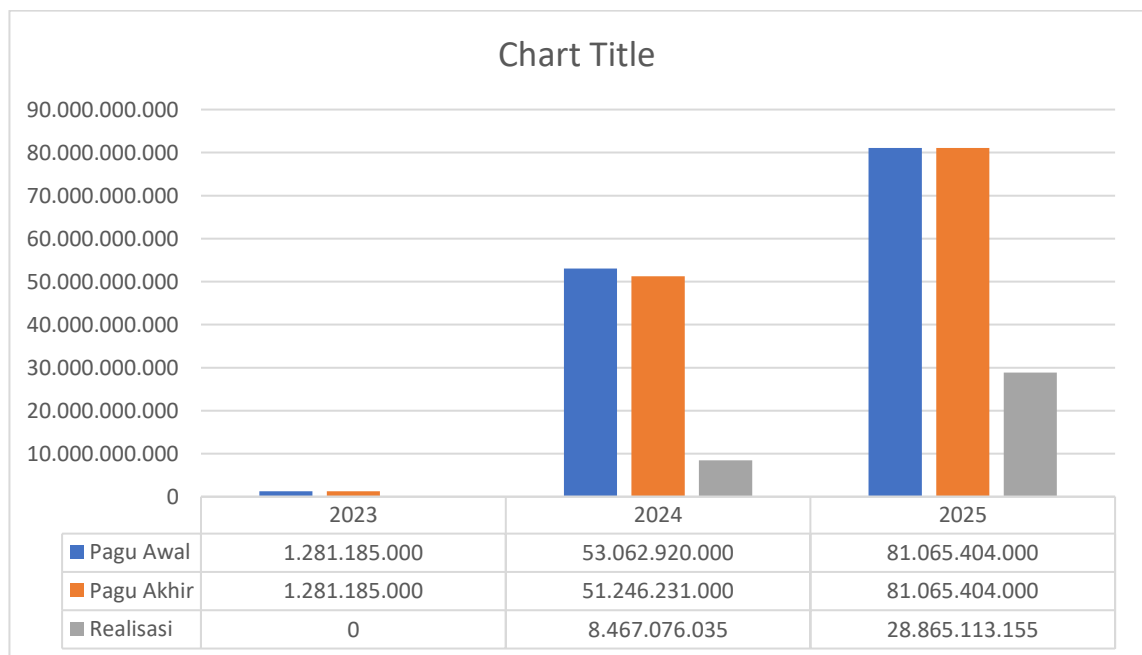
Tabel II. 13 Rincian Realokasi Per Sasaran Kegiatan dan Kegiatan Tahun 2025

KODE	NOMENKLATUR	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN II	TRIWULAN I	
	PROGRAM			REALISASI	%
690669	Balai Pengelola Transportasi Darat Kalimantan Utara	81.065.404.000	81.065.404.000	28.865.113.155	35,61
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	68.211.375.000	68.211.375.000	22.920.044.424	33,60
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	34.789.195.000	34.789.195.000	6.861.662.530	19,72
4638	Pelayanan Transportasi Darat	1.985.760.000	1.985.760.000	768.653.100	38,71
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	27.335.420.000	27.335.420.000	15.038.269.606	55,01
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	4.101.000.000	4.101.000.000	251.459.188	6,13
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	12.854.029.000	12.854.029.000	5.945.068.731	46,25
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	6.208.439.000	6.208.439.000	2.439.635.518	39,30
4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	6.645.590.000	6.645.590.000	3.505.433.213	52,75

3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2023-2025

Tabel II. 14 Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2023-2025

NO	TAHUN	PAGU AWAL (Rp)	PAGU AKHIR (Rp)	REALISASI TW II	
				Rp	%
1	2023	1.281.185.000	1.281.185.000	0	0,00%
2	2024	53.062.920.000	51.246.231.000	8.467.076.035	16,52%
3	2025	81.065.404.000	81.065.404.000	28.865.113.155	35,61%



Gambar II. 10 Grafik Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2023-2025

Berdasarkan data di atas dapat diketahui nilai pagu awal, pagu akhir, dan realisasi setiap tahunnya, sehingga diketahui masing-masing dana yang terserap setiap tahunnya. Seperti pada tahun 2023 anggaran yang terserap sebesar Rp1.281.046.898,- atau mencapai 99,99% dari pagu akhir Rp. 1.281.185.000,-. Pada tahun 2024 berjalan tepatnya pada Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp. 29.901.294.526,- atau mencapai 52,65% dari pagu akhir Rp. 56.792.791.000,-. Dan pada tahun 2025 berjalan tepatnya pada Triwulan II anggaran yang terserap sebesar Rp. 28.865.113.155,- atau mencapai 35,61% dari pagu awal Rp. 81.065.404.000,-.

II.3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025

1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan dan Kegiatan Tahun 2025

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II. 15 Kegiatan Program yang ada dalam DIPA

KODE	NOMENKLATUR	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN II	TRIWULAN I	
	PROGRAM			REALISASI	%
690669	Balai Pengelola Transportasi Darat Kalimantan Utara	81.065.404.000	81.065.404.000	28.865.113.155	35,61
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	68.211.375.000	68.211.375.000	22.920.044.424	33,60
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	34.789.195.000	34.789.195.000	6.861.662.530	19,72
4638	Pelayanan Transportasi Darat	1.985.760.000	1.985.760.000	768.653.100	38,71
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	27.335.420.000	27.335.420.000	15.038.269.606	55,01
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	4.101.000.000	4.101.000.000	251.459.188	6,13
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	12.854.029.000	12.854.029.000	5.945.068.731	46,25
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	6.208.439.000	6.208.439.000	2.439.635.518	39,30
4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	6.645.590.000	6.645.590.000	3.505.433.213	52,75

Realisasi penyerapan anggaran Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 28.865.113.155,- atau mencapai 35,61% dari pagu akhir Rp. 81.065.404.000,-.

2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025

Tabel II. 16 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025

NO	JENIS BELANJA	PAGU ALOKASI (TW II)	REALISASI TW II	
		Rp	Rp	%
1	BELANJA PEGAWAI	6.645.590.000	3.505.433.213	52,75
2	BELANJA BARANG	55.577.487.000	17.219.575.886	30,98

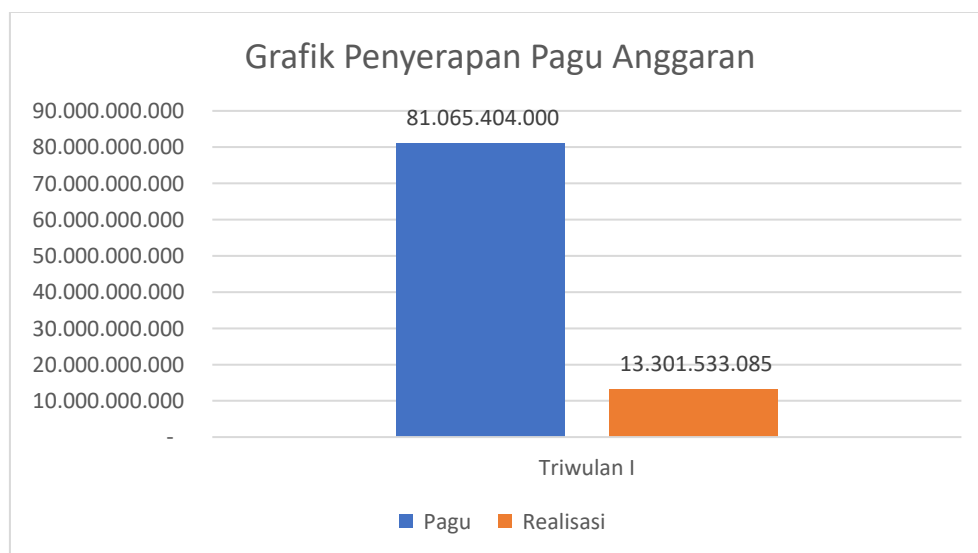
3	BELANJA MODAL	18.842.327.000	8.140.104.056	43,20
TOTAL		81.065.404.000	28.865.113.155	35,61

3. Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2025

Adapun data realisasi anggaran per sumber dana pada tahun 2025 yang sudah di analisis per Triwulan II, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II. 17 Realisasi Anggaran per Jenis Sumber Dana Triwulan II TA 2025

NO	SUMBER DANA	PAGU ALOKASI (TW I)	REALISASI TW I	
		Rp	Rp	%
1	RUPIAH MURNI	78.780.404.000	28.865.113.155	36,64
2	PNBP	2.285.000.000	-	-
3	SBSN	-	-	-
TOTAL		81.065.404.000	13.301.533.085	35,61



Gambar II. 11 Grafik Penyerapan Pagu Anggaran Triwulan II Tahun 2025

4. Analisis Dana yang tidak terserap oleh unit kerja

Berikut merupakan data dari dana yang tidak terserap oleh unit kerja berdasarkan per jenis belanja, per sumber dana, dan sisa anggaran pada tahun 2025 berjalan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II. 18 sisa Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2025 Berjalan

NO	JENIS RUPIAH	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	BELANJA PEGAWAI	6.645.590.000	3.505.433.213	3.140.156.787
2	BELANJA BARANG	55.577.487.000	17.219.575.886	38.357.911.114
3	BELANJA MODAL	18.842.327.000	8.140.104.056	10.702.222.944
TOTAL		81.065.404.000	28.865.113.155	52.200.290.845

Tabel II. 19 sisa Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025 Berjalan

NO	JENIS RUPIAH	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	RUPIAH MURNI	78.780.404.000	28.865.113.155	49.915.290.845
2	PNBP	2.285.000.000	-	2.285.000.000
3	SBSN	-	-	-
TOTAL		81.065.404.000	28.865.113.155	52.200.290.845

II.3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan

Berikut merupakan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan berdasarkan sasaran program per Triwulan II Tahun 2025, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II. 20 Efisiensi Anggaran

NO	SASARAN KEGIATAN		TRIWULAN I		
			%CAPAIAN RATA-RATA KINERJA SASARAN	%CAPAIAN KEUANGAN	EFISIENSI (POSISI TRIWULAN II)
1	SK1	Meningkatnya konektivitas	61,77%	28,89%	46,77%

		transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi			
2	SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	21,36%	19,25%	90,12%
3	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	6,13%	6,13%	100%
4	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	46,25%	46,25%	100%

2. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia

Tabel II. 21 Perbandingan Jumlah Kebutuhan dan Jumlah eksisting SDM

No	Jumlah Kebutuhan Sdm	Realisasi Sdm	Capaian Sdm	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1.	100	94	94%	30,796	33,67%	146,63%

Berdasarkan data diatas dapat kita ketahui bahwa dibandingkan dengan rata-rata target kinerja sebesar 100 dengan realisasi kinerja sebesar 42,76% menunjukkan capaian SDM sebesar 94% dengan realisasi sebanyak 94 SDM dari jumlah kebutuhan SDM sebesar 100, dimana realisasi tersebut terdiri atas 60 Pegawai Negeri Sipil dan 34 Pegawai non ASN.

3. Hambatan dan kendala

Beberapa Hambatan/Kendala masih rendahnya realisasi daya serap anggaran antara lain:

- Masih kurangnya pemenuhan dalam Sumber Daya Manusia yang memenuhi kompetensi di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara;
- Sistem perencanaan yang masih kurang matang mengenai pemahaman kebutuhan anggaran;
- Dalam Kegiatan kontrak, faktor cuaca/ faktor alam tidak menentu yg menjadikan kendala dalam pelaksanaannya.



BAB III

PENUTUP

BAB III PENUTUP

III.1 PENUTUP

Dalam rangka perwujudan tanggungjawab pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara, Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) Triwulan II ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

III.1.1 Ringkasan Capaian

Sebagai penutup dari Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) Triwulan II dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Perjanjian Kinerja tahun 2025, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan hingga Triwulan II tahun 2025 ini terdapat 9 (Sembilan) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) BPTD Kelas III Kalimantan Utara. Terdapat 9 (sembilan) Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% ($IKK \geq 100\%$). Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada tahun 2025 Triwulan II adalah sebagai berikut:
 - a. Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan terealisasi sebesar 26,08% (Target 90%) tercapai 26,08%;
 - b. Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda terealisasi sebesar 34,43% (Target 1 Lokasi) tercapai 34,43%;
 - c. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan terealisasi sebesar 16,33% (Target 90%) tercapai 16,33%;
 - d. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi terealisasi sebesar 11 Lokasi (Target 53 lokasi) tercapai 38,71%;
 - e. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terealisasi sebesar 57,76% (Target 90%) tercapai 57,76%;
 - f. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan terealisasi sebesar 0% (Target 100 orang) tercapai 0%;
 - g. Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar 0% (Target 80%) tercapai 0%;
 - h. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terealisasi senilai 6,13 (Target 100) tercapai 6,13%;
 - i. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat terealisasi senilai 46,25 (Target 100) tercapai 46,25%.

2. Untuk meningkatkan capaian kinerja di triwulan selanjutnya, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara akan melakukan proses yang lebih selektif terhadap pengusulan target renstra dengan menerapkan skala prioritas untuk peningkatan pembangunan sarana dan prasarana dengan pertimbangan ketersediaan anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara;
3. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara juga akan meningkatkan koordinasi dengan melakukan monitoring keselamatan dan keamanan transportasi darat dan penyeberangan agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju zero accident.

III.2 HASIL EVALUASI, REKOMENDASI DAN UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB

Adapun hasil evaluasi, rekomendasi dan unit kerja penanggung jawab dijabarkan sebagai berikut:

Tabel III. 1 Evaluasi, rekomendasi dan unit kerja penanggung jawab

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI TRANSPORTASI DARAT KELAS III KALIMANTAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan 9				Realisasi Bulan 9		% Capaian Bulan 9		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	%	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase Layanan Angkutan Jalan Perintis	%	90	Subsidi Operasional Bus Perintis Provinsi Kalimantan Utara	IKK1.1 Persentase Layanan Angkutan Jalan Perintis	Layanan Angkutan Perintis Jalan	4	90%	167.149.650	100%	2	236.125.994	90%	141%	TERCAPAI	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut. Kegiatan sudah dilaksanakan dan 2 dr 4 lintasan tdk beroperasi dikarenakan terkena AA sehingga yang beroperasi hanya 2 lintasan perintis jalan	Kepala Balai
		IKK1.3 Persentase Layanan Angkutan Barang Prioritas Nasional (Subsidi Angkutan Barang)	%	90	Subsidi Operasional Angkutan Barang Provinsi Kalimantan Utara	IKK1.3 Persentase Layanan Angkutan Barang Prioritas Nasional (Subsidi Angkutan Barang)	Layanan Angkutan Perintis Angkutan Barang	1	90%	548.670.420	100%	1	631.426.747	90%	115%	TERCAPAI	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan barang bagi masyarakat guna meningkatkan Distribusi barang dan meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut.	Kepala Balai
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	90	Subsidi Operasional Angkutan Penyeberangan Provinsi Kalimantan Utara	IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	Layanan Angkutan Perintis Penyeberangan	2	90%	675.000.000	100%	2	98.452.767	90%	15%	TERCAPAI	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan perintis Penyeberangan bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut.	Kepala Balai
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	53	Operasional Pelabuhan SDP	IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Pengawasan operasional Pelabuhan SDP	53	100%	279.549.729	100%	10	33.428.332	100%	12%	BELUM OPTIMAL	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf pelabuhan penyeberangan 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Pelabuhan penyeberangan 4. Belum optimal dikarenakan operasional pelabuhan yang belum berjalan secara lancar	Kepala Balai
2	SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Perlengkapan Fasilitas Keselamatan Jalan	6	90%	2.155.424.186	100%	6	2.032.559.200	90%	94%	TERCAPAI	1. Menginventaris kebutuhan infrastruktur keselamatan jalan 2. Membangun dan memfasilitasi infrastruktur keselamatan jalan 3. Melakukan monitoring terhadap fasilitas jalan yang telah terpasang 4. Pengadaan perlengkapan jalan sudah selesai tetapi dibulan september terdapat penambahan anggaran sehingga terdapat pengadaan kembali, sudah berjalan tetapi realisasi keuangan keluar SP2D dibulan Oktober	Kepala Balai
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Jalan	IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Pelayanan keselamatan Transportasi Jalan	0	100%	0	100%	0	0	100%	100%	TERCAPAI	Sudah dilaksanakan bulan Juni dan realisasi anggaran dari pembayaran Termin akhir acara puncak dibulan Oktober	Kepala Balai
		IKK7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	80	Pengadaan Alat Uji Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	IKK7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Alat Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	1	80%	0	100%	1	0	80%	100%	TERCAPAI	Pengadaan Alat Kalibrasi Uji Berkala Sudah terealisasi dibulan Mei	Kepala Balai
3	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK4.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	100	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tupoksi Ditjen Hubdat	IKK4.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tupoksi Ditjen Hubdat	8,3	100%	366.679.417	100%	8,3	257.813.949	100%	70%	TERCAPAI	1. Pengelolaan Bidang Ketatausahaan 2. Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan 3. Monitoring Pengendalian dan Pengelolaan Prasarana 4. Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas 5. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas 6. Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalu Lintas, dan Angkutan 7. Melakukan kegiatan operasional manajemen perkantoran sudah dilaksanakan tetapi untuk realisasi keuangan belum optimal	Kepala Balai
4	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100	Peningkatan Layanan Perkantoran	IKK1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Layanan Dukungan	8,3	100%	495.445.667	100%	8,3	313.128.563	100%	63%	TERCAPAI	Melakukan kegiatan operasional manajemen perkantoran sudah dilaksanakan tetapi untuk realisasi keuangan belum optimal	Kepala Balai
		IKK1 Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Nilai			IKK1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Layanan Dukungan	0	100%	0	100%	0	0	0%	0%	BELUM DILAKSANAKAN	Reubelair guna penunjang operasional prasarana kantor dilaksanakan dibulan	Kepala Balai



LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

RENCANA KINERJA TAHUNAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	90
		IKK1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	1
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	90
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	11
2	SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100
		IKK7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	80
3	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK4.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	100
4	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100

Tanjung Selor, 29 November 2024
Kepala Balai,



IRDA HARIYONO SOEKIRNO, S.SiT.,M.M.
NIP 197101241995031001

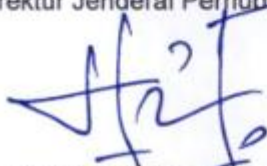
Lampiran I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	90
		IKK1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	1
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	90
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	11
2	SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100
		IKK7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	80
3	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK4.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	100
4	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100

Kegiatan	Anggaran
1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 34.789.195.000
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 1.985.760.000
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 27.335.420.000
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 4.101.000.000
5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 6.208.439.000
6. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 6.645.590.000

Disetujui
Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat



AHMAD YANI, A.T.D., M.T.
NIP 196509301990031003

Tanjung Selor, 2 Januari 2025
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas III Kalimantan Utara



IRDA HARIYONO SOEKIRNO, S.SiT., M.M
NIP 1971012495031001

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III KALIMANTAN UTARA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)
1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase Layanan Angkutan Jalan Perintis	%	90	Penyelenggaraan Operasional Angkutan Jalan Perintis	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	Rp 5.346.849.000	Kepala Balai
			IKK1.3	Persentase Layanan Angkutan Barang Prioritas Nasional	%	90	Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Barang	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	Rp 6.798.180.000	Kepala Balai
			IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	90	Penyelenggaraan Operasional Angkutan Penyeberangan Perintis	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	Rp 19.144.166.000	Kepala Balai
			IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	%	90	Pembangunan Halte Sungai Dermaga Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	Rp 3.500.000.000	Kepala Balai
					Lokasi	11	Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	Rp 1.985.760.000	Kepala Balai
2	SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	Rp 25.435.420.000	Kepala Balai
					%	90	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	Rp 600.000.000	Kepala Balai
			IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang	Orang	100	Penyelenggaraan Pekan Nasional Keselamatan Jalan	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	Rp 200.000.000	Kepala Balai
			IKK7a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	80	Pemeliharaan Alat Uji Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	Rp 100.000.000	Kepala Balai
					%	80	Pengadaan Alat Uji Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	Rp 1.000.000.000	Kepala Balai
3	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK4.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	100	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tupoksi Ditjen Hubdat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Rp 4.101.000.000	Kepala Balai
4	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100	Peningkatan Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Kantor)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Rp 6.208.439.000	Kepala Balai
					Nilai	100	Peningkatan Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Rp 6.645.590.000	Kepala Balai

Tanjung Selor, 2 Januari 2025
**Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas III Kalimantan Utara**



Irda Hariyono Soekirno, S.SiT., MM.
NIP 197101241995031001



RENCANA AKSI ATAS REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III KALIMANTAN UTARA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)
1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase Layanan Angkutan Jalan Perintis	%	90	Penyelenggaraan Operasional Angkutan Jalan Perintis	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	Rp 5.381.036.000	Kepala Balai
			IKK1.3	Persentase Layanan Angkutan Barang Prioritas Nasional	%	90	Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Barang	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	Rp 6.798.180.000	Kepala Balai
			IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	90	Penyelenggaraan Operasional Angkutan Penyeberangan Perintis	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	Rp 12.099.626.000	Kepala Balai
			IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	53	Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Rp 2.170.760.000	Kepala Balai
2	SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi Ideal	%	90	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	Rp 15.017.817.000	Kepala Balai
			IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang	Orang	100	Penyelenggaraan Pekan Nasional Keselamatan Jalan	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	Rp 350.000.000	Kepala Balai
			IKK7a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan	%	80	Pengadaan Alat Uji Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	Rp 900.000.000	Kepala Balai
3	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK4.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	100	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tupoksi Ditjen Hubdat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Rp 4.400.153.000	Kepala Balai
4	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100	Peningkatan Layanan Perkantoran	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Rp 5.945.348.000	Kepala Balai

Tanjung Selor, Maret 2024
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas III Kalimantan Utara


Irda Haryono Soekirno, S.ST., MM.
 NIP. 197101241995031001



RENCANA AKSI ATAS REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III KALIMANTAN UTARA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase Layanan Angkutan Jalan Perintis	%	90	Penyelenggaraan Operasional Angkutan Jalan Perintis	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	Rp 4.585.580.000	Kepala Balai
		IKK1.2 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda	Lokasi	1	Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Barang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Rp 6.096.338.000	Kepala Balai
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keberintisan angkutan penyeberangan	%	90	Penyelenggaraan Operasional Angkutan Penyeberangan Perintis	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	Rp 11.780.235.000	Kepala Balai
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	53	Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	Rp 2.170.760.000	Kepala Balai
2	SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	Rp 15.017.817.000	Kepala Balai
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang	Orang	100	Penyelenggaraan Pekan Nasional Keselamatan Jalan	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	Rp 350.000.000	Kepala Balai
		IKK7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan	%	80	Pengadaan Alat Uji Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	Rp 900.000.000	Kepala Balai
4	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK4.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	100	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tupoksi Ditjen Hubdat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Rp 4.400.153.000	Kepala Balai
5	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100	Peningkatan Layanan Perkantoran	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Rp 5.945.348.000	Kepala Balai

Tanjung Selor, 26 Juni 2024
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas III Kalimantan Utara

Irda Hariyono Soekirno, S.SiT., MM.
NIP 197101241995031001

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI TRANSPORTASI DARAT KELAS III KALIMANTAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BULAN JANUARI

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan 1				Realisasi Bulan 1		% Capaian Bulan 1		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	%	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keberintisan angkutan jalan	%	90	Subsidi Operasional Bus Perintis Provinsi Kalimantan Utara	IKK1.1 Persentase Layanan Angkutan Jalan Perintis	Layanan Angkutan Perintis Jalan	5	90%	0	100%	0	0	90%	0%	BELUM TERLAKSANA	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut. Terdapat 5 trayek yang beroperasi di tahun 2025 pada bulan Januari sudah dilakukan kontrak akan tetapi pada akhir Januari terdapat intruksi Presiden untuk dilakukannya penundaan atau penghentian sementara kontrak guna efisiensi atau penghematan anggaran sehingga untuk operasional kegiatan perintis jalan berhenti sementara sampai waktu yang tidak bisa ditentukan	Kepala Balai
		IKK1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	1	Subsidi Operasional Angkutan Barang Provinsi Kalimantan Utara	IKK1.3 Persentase Layanan Angkutan Barang Prioritas Nasional (Subsidi Angkutan Barang)	Layanan Angkutan Perintis Angkutan Barang	1	90%	0	100%	0	0	90%	0%	BELUM TERLAKSANA	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan barang bagi masyarakat guna meningkatkan Distribusi barang dan meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut. Trayek Kegiatan perintis angkutan barang 2025 masih sama dengan tahun 2024 pada bulan Januari sudah dilakukan kontrak akan tetapi pada akhir Januari terdapat intruksi Presiden untuk dilakukannya penundaan atau penghentian sementara kontrak guna efisiensi atau penghematan anggaran sehingga untuk operasional kegiatan perintis angkutan barang berhenti sementara sampai waktu yang tidak bisa ditentukan	Kepala Balai
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keberintisan angkutan penyeberangan	%	90	Subsidi Operasional Angkutan Penyeberangan Provinsi Kalimantan Utara	IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keberintisan angkutan penyeberangan	Layanan Angkutan Perintis Penyeberangan	2	90%	0	100%	0	0	90%	0%	BELUM TERLAKSANA	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan perintis penyeberangan bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut. Terdapat 2 trayek yang beroperasi di tahun 2025 sama dengan tahun 2025 pada bulan Januari sudah dilakukan kontrak akan tetapi pada akhir Januari terdapat intruksi Presiden untuk dilakukannya penundaan atau penghentian sementara kontrak guna efisiensi atau penghematan anggaran sehingga untuk operasional kegiatan perintis ASDP berhenti sementara sampai waktu yang tidak bisa ditentukan	Kepala Balai
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	11	Operasional Pelabuhan SDP	IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Pengawasan operasional Pelabuhan SDP	11	100%	148.932.000	100%	11	302.559.000	100%	203%	TERCAPAI	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SDP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf pelabuhan penyeberangan 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Pelabuhan penyeberangan	Kepala Balai
2	SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Perlengkapan Fasilitas Keselamatan Jalan	9	90%	6.528.000.000	100%	6	6.461.919.600	67%	99%	TERCAPAI	1. Menginventaris kebutuhan infrastruktur keselamatan jalan 2. Membangun dan memfasilitasi infrastruktur keselamatan jalan 3. Melakukan monitoring terhadap fasilitas jalan yang telah terpasang 4. Terdapat Kegiatan Perlengkapan Jalan yang sudah dilakukan kontrak dan pencairan Uang Muka 5. Penundaan atau penghentian sementara kontrak guna efisiensi atau penghematan anggaran sehingga untuk operasional kegiatan Pengadaan Perlengkapan Jalan berhenti sementara sampai waktu yang tidak bisa ditentukan	Kepala Balai
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Jalan	IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Pelayanan keselamatan Transportasi Jalan	1	100	0	100%	0	0	100%	0%	BELUM TERLAKSANA	Akan dilaksanakan Pekan Keselamatan Jalan pada bulan Juni - Juli	Kepala Balai
		IKK7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	80	Pengadaan Alat Uji Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	IKK7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Alat Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	1	80%	0	100%	0	0	80%	0%	BELUM TERLAKSANA	Pengadaan Alat Kalibrasi Uji Berkala akan dilakukan setelah adanya arahan lebih lanjut mengenai efisiensi dan penghematan anggaran	Kepala Balai
3	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK4.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	100	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tindakan Perbaikan	IKK4.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tindakan Perbaikan	6	100%	225.895.833	100%	6	29.328.520	100%	13%	TERCAPAI	1. Pengelolaan Bidang Ketatausahaan 2. Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan 3. Monitoring Pengendalian dan Pengelolaan Prasarana 4. Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas 5. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas 6. Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalu Lintas, dan Angkutan 7. Kegiatan Sudah Dilaksanakan akan tetapi realisasi anggaran keluar SP2D dibulan Februari 8. Adanya Inpres mengenai Efisiensi dan Penghematan anggaran sehingga dapat mengurangi penyerapan anggaran yang akan dilakukan	Kepala Balai
4	SK3 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100	Peningkatan Layanan Perkantoran	IKK1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Layanan Dukungan	1	100%	1.057.536.583	100%	1	1.361.337.573	100%	129%	TERCAPAI	Kegiatan yang terdapat dalam sub ini yaitu kegiatan operasional perkantoran. Kegiatan sudah tercapai	Kepala Balai

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI TRANSPORTASI DARAT KELAS III KALIMANTAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BULAN FEBRUARI

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan 2				Realisasi Bulan 2		% Capaian Bulan 2		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	563 Meningkatkan konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	90	Subsidi Operasional Bus Perintis Provinsi Kalimantan Utara	IKK1.1 Persentase Layanan Angkutan Jalan Perintis	Layanan Angkutan Perintis Jalan	5	90%	0	100%	0	0	45%	0%	SUDAH DIKASNAKAN	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut. Terdapat 5 trayek yang beroperasi di tahun 2025 pada bulan Januari sudah dilakukan kontrak akan tetapi pada akhir Januari terdapat intruksi Presiden untuk dilakukannya penundaan atau penghentian sementara kontrak guna efisiensi atau penghematan anggaran sehingga untuk operasional kegiatan perintis jalan berhenti sementara sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Akan tetapi pada bulan februari sudah memulai operasional akan tetapi tidak melayani full atau hanya dilayani setengah bulan. Realisasi Anggaran terhambat karena adanya addendum kontrak akibat efisiensi anggaran	Kepala Balai
		IKK1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	1	Subsidi Operasional Angkutan Barang Provinsi Kalimantan Utara	IKK1.3 Persentase Layanan Angkutan Barang Prioritas Nasional (Subsidi Angkutan Barang)	Layanan Angkutan Perintis Angkutan Barang	1	90%	0	100%	0	0	45%	0%			
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	90	Subsidi Operasional Angkutan Penyeberangan Provinsi Kalimantan Utara	IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	Layanan Angkutan Perintis Penyeberangan	2	90%	0	100%	0	0	45%	0%			
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	11	Operasional Pelabuhan SDP	IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Pengawasan operasional Pelabuhan SDP	11	100%	105.480.000	100%	11	304.603.500	100%	184%			
2	564 Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpaspang terhadap kondisi ideal	%	90	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpaspang terhadap kondisi ideal	Perlengkapan Fasilitas Keselamatan Jalan	9	90%	1.941.282.000	100%	6	157.500.000	67%	8%	TORCAPAI	1. Menginventaris kebutuhan infrastruktur keselamatan jalan 2. Membangun dan memfasilitasi infrastruktur keselamatan jalan 3. Melakukan monitoring terhadap fasilitas jalan yang telah terpaspang 4. Terdapat Kegiatan Perlengkapan jalan yang sudah dilakukan kontrak dan pencairan Uang Muka 5. Penundaan atau penghentian sementara kontrak guna efisiensi atau penghematan anggaran sehingga untuk operasional kegiatan Pengadaan Perlengkapan jalan berhenti sementara sampai waktu yang tidak bisa ditentukan	Kepala Balai
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang sosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Jalan	IKK3.5 Jumlah masyarakat yang sosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Pelayanan keselamatan Transportasi Jalan	1	100	0	100%	0	0	100%	0%			
		IKK7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	80	Pengadaan Alat Uji Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	IKK7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Alat Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	1	80%	0	100%	0	0	80%	0%			
3	565 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK4.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	100	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tindakan Hubdan	IKK4.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tindakan Hubdan	6	100%	225.895.833	100%	6	54.699.581	100%	24%	TORCAPAI	1. Pengelolaan Bidang Ketatausahaan 2. Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan 3. Monitoring Pengendalian dan Pengelolaan Prasarana 4. Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas 5. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas 6. Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalu Lintas, dan Angkutan 7. Kegiatan Sudah Dilaksanakan akan tetapi realisasi anggaran keluar SP2D dibulan Februari 8. Adanya Inpres mengenai Efisiensi dan Penghematan anggaran sehingga dapat mengurangi penyerapan anggaran yang akan dilakukan. 9. Terdapat anggaran yang terkena blokir akibat efisiensi anggaran 10. Realisasi terhambat dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran.	Kepala Balai
		IKK1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100	Peningkatan Layanan Perkantoran	IKK1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Layanan Dukungan	1	100%	1.071.166.083	100%	1	868.165.907	100%	81%			
4	563 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100	Peningkatan Layanan Perkantoran	IKK1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Layanan Dukungan	1	100%	1.071.166.083	100%	1	868.165.907	100%	81%	TORCAPAI	Kegiatan yang terdapat dalam sub ini yaitu kegiatan operasional perkantoran. Kegiatan sudah tercapai. Akan tetapi realisasi terhambat dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran.	Kepala Balai

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI TRANSPORTASI DARAT KELAS III KALIMANTAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BULAN MARET

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan 2				Realisasi Bulan 2		% Capaian Bulan 2		Evaluasi	Rencana Tidak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintihan angkutan jalan	%	90	Subsidi Operasional Bus Perintis Provinsi Kalimantan Utara	IKK1.1 Persentase Layanan Angkutan Jalan Perintis	Layanan Angkutan Perintis Jalan	5	90%	296.877.132	100%	5	196.710.179	100%	66%	SUDAH DIKSAKNAKAN	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut. Terdapat 5 trayek yang beroperasi di tahun 2025 pada bulan Januari sudah dilakukan kontrak akan tetapi pada akhir Januari terdapat Intruksi Presiden untuk dilakukannya penundaan atau penghentian sementara kontrak guna efisiensi atau penghematan anggaran sehingga untuk operasional kegiatan perintis jalan berhenti sementara sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Akan tetapi pada bulan Maret sudah beroperasi normal. Capaian anggaran kurang dikarenakan terdapat tagihan yang tidak sesuai dengan nilai termin atau addendum nilai pada termin dan terdapat realisasi anggaran yang seharusnya dibulan maret akan tetapi SP2Dnya dibulan berikutnya.	Kepala Balai
		IKK1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	1	Subsidi Operasional Angkutan Barang Provinsi Kalimantan Utara	IKK1.3 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani subsidi Angkutan Antarmoda	Layanan Angkutan Perintis Angkutan Barang	1	90%	1.063.090.000	100%	0	541.120.647	100%	51%	SUDAH DIKSAKNAKAN	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan barang bagi masyarakat guna meningkatkan Distribusi barang dan meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut. Trayek Kegiatan perintis angkutan barang 2025 masih sama dengan tahun 2024 pada bulan Januari sudah dilakukan kontrak akan tetapi pada akhir Januari terdapat Intruksi Presiden untuk dilakukannya penundaan atau penghentian sementara kontrak guna efisiensi atau penghematan anggaran sehingga untuk operasional kegiatan perintis angkutan barang berhenti dan pada bulan maret sudah beroperasi seperti biasa. Capaian anggaran kurang dikarenakan terdapat tagihan yang tidak sesuai dengan nilai termin atau addendum nilai pada termin tersebut	Kepala Balai
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintihan angkutan penyeberangan	%	90	Subsidi Operasional Angkutan Penyeberangan Provinsi Kalimantan Utara	IKK1.5 Persentase pelaksanaan angkutan penyeberangan	Layanan Angkutan Perintis Penyeberangan	2	90%	1.071.240.000	100%	2	0	100%	0%	BELUM OPTIMAL	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan perintis Penyeberangan bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut. Terdapat 2 trayek yang beroperasi di tahun 2025 sama dengan tahun 2025 pada bulan Januari sudah dilakukan kontrak akan tetapi pada akhir Januari terdapat Intruksi Presiden untuk dilakukannya penundaan atau penghentian sementara kontrak guna efisiensi atau penghematan anggaran akan tetapi pada bulan Maret sudah mulai operasional seperti biasa. kegiatan ini sudah berjalan tetapi untuk penyerapan anggaran belum terlaksana dikarenakan tagihan dan laporan kegiatan dari penyedia belum ada masuk ke kantor	Kepala Balai
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	11	Operasional Pelabuhan SDP	IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Pengawasan operasional Pelabuhan SDP	11	100%	17.331.750	100%	11	51.545.100	100%	29%	TERCAPAI	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SDP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf pelabuhan penyeberangan 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Pelabuhan penyeberangan 4. Penyerapan Anggaran pada kegiatan ini sudah mencapai 84,4% disebabkan adanya blokir terkait efisiensi anggaran	Kepala Balai
2	SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Perlengkapan Fasilitas Keselamatan Jalan	9	90%	1.808.591.400	100%	6	1.811.430.000	67%	100%	TERCAPAI	1. Menginventaris kebutuhan infrastruktur keselamatan jalan 2. Membangun dan memfasilitasi infrastruktur keselamatan jalan 3. Melakukan monitoring terhadap fasilitas jalan yang telah terpasang 4. Adanya Addendum kontrak yang merubah nilai kontrak dan hanya dibayarkan uang muka saja dikarenakan kebijakan efisiensi anggaran	Kepala Balai
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Jalan	IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Pelayanan keselamatan Transportasi Jalan	1	100	0	100%	0	0	0%	0%	BELUM TERLAKSANA	Akan dilaksanakan Pekan Keselamatan Jalan pada bulan Juni- Juli dan terdapat Efisiensi Anggaran sehingga anggaran nya terkena Blokir	Kepala Balai
		IKK7a Persentase Standarisasi/Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	80	Pengadaan Alat Uji Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	IKK7a Persentase Standarisasi/Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Alat Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	1	80%	0	100%	0	0	0%	0%	BELUM TERLAKSANA	Pengadaan Alat Kalibrasi Uji Berkala akan dilakukan setelah adanya arahan lebih lanjut mengenai efisiensi dan penghematan anggaran	Kepala Balai
3	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK4.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	100	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tupoksi Ditjen Hubdat	IKK4.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tupoksi Ditjen Hubdat	6	100%	21.403.690	100%	6	1.350.020	100%	6%	TERCAPAI	1. Pengelolaan Bidang Ketatausahaan 2. Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan 3. Monitoring Pengendalian dan Pengelolaan Prasarana 4. Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas 5. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas 6. Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalu Lintas, dan Angkutan 7. Kegiatan Sudah Dilaksanakan akan tetapi realisasi anggaran keluar SP2D dibulan Februari 8. Adanya lpsen mengenai Efisiensi dan Penghematan anggaran sehingga dapat mengurangi penyerapan anggaran yang akan dilakukan. 9. Terdapat anggaran yang terkena blokir akibat efisiensi anggaran. 10. Realisasi terhambat dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran.	Kepala Balai
4	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100	Peningkatan Layanan Perkantoran	IKK1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Layanan Dukungan	1	100%	928.105.752	100%	1	1.159.263.478	100%	125%	TERCAPAI	Kegiatan yang terdapat dalam sub ini yaitu kegiatan operasional perkantoran. Kegiatan sudah tercapai	Kepala Balai



SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI